



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Penyelenggaraan Organisasi & Pelaksanaan Program AMAN

Abdon Nababan,
Sekretaris Jendral AMAN

Periode Pelaporan:
Februari – September 2013

Disampaikan pada:

Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keduabelas
(RPB AMAN XII)

Bogor, 17-18 Oktober 2013



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Pengantar

Laporan ini dibuat untuk mempertanggung-jawabkan penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Besar (PB) AMAN sesuai dengan mandat dan keputusan-keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV di *Tobelo, Halmahera Utara* pada tanggal 17-21 April 2012 dan RAKERNAS AMAN III pada tanggal 19-23 Februari 2013 di *Tumbang Malahoi* di Kalimantan Tengah.

Laporan ini terdiri atas empat bagian. Bagian Pertama, Bidang Politik yaitu Advokasi Hukum dan Politik yang menjadi tanggung jawab Deputy II. Bagian Ke-dua, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya termasuk Dukungan serta Pelayanan Masyarakat Adat yang menjadi tanggung jawab Deputy III. Bagian Ke-tiga, Bidang Penguatan Organisasi yang menjadi tanggung jawab Deputy I. Bagian Ke-empat mengenai organisasi sayap dan badan-badan Otonom yang menjadi perkerjaan lintas Deputy.

Selamat Menyimak!

Bogor 16 Oktober 2013

Abdon Nababan
Sekjen AMAN



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Bagian I

Advokasi, Hukum dan Politik

Tujuan strategis:

Membangun kerangka yang kokoh bagi AMAN untuk melakukan intervensi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat melalui tekanan di basis-basis masyarakat adat yang kritis dan progresif, dukungan masyarakat sipil, media massa dan jaringan internasional yang luas serta intervensi kebijakan di lokus-lokus pemerintahan yang “*pro-green*”, “*pro-poor*” dan komunitas politik yang “populis”-kerakyatan

Capaian strategis:

1. Keluarnya Undang-Undang Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia
2. Terbentuknya satu institusi negara yang khusus mengurus hal-hal terkait Masyarakat Adat
3. Adanya langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah-wilayah Masyarakat Adat
4. Pendampingan hukum terhadap kasus-kasus konflik yang dialami oleh Masyarakat Adat ditangani secara efektif

Intervensi program PB AMAN dalam kerja advokasi hukum dan kebijakan ini dilakukan melalui:

- (1) Pengembangan kerangka analisis kebijakan berperspektif Masyarakat Adat.
- (2) Lobby dan intervensi berbagai kebijakan lokal, nasional dan internasional.
- (3) Penanganan kasus-kasus strategis dan berdampak langsung dengan pembaruan kebijakan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem data base kasus pelanggaran HAM dan konflik masyarakat adat dengan pihak-pihak lain.
- (5) Penguatan kapasitas PW AMAN untuk melakukan pembelaan
- (6) Pelayanan hukum bagi masyarakat adat yang sedang menghadapi kasus-kasus konflik.

Secara umum, kerja Advokasi Hukum dan Politik AMAN masih terpusat pada tingkat nasional sementara di tingkat wilayah dan daerah belum cukup merata, baik dalam hal kapasitas maupun sumberdaya. Beberapa Pengurus Wilayah (PW) masih belum memiliki Biro Advokasi, sementara ada juga PW yang berkali-kali mengganti Biro Advokasinya dalam waktu singkat. Hal ini menyulitkan koordinasi dan penanganan kerja-kerja advokasi di lapangan. Perubahan-perubahan kebijakan pada tingkat daerah masih harus ditangani langsung oleh Pengurus Besar, ada juga kasus-kasus konflik yang terjadi pada komunitas-komunitas anggota.

Dari kalangan Pengurus dan anggota AMAN, gairah untuk terjun ke dunia politik cukup tinggi, Ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Namun infrastruktur Politik AMAN untuk menangani pekerjaan terkait politik ini belum tersedia. Dalam struktur PB AMAN belum tersedia Direktur Politik yang secara khusus menjadi pusat komando kerja-kerja politik AMAN. Pada RPB XII ini diharapkan adanya masukan-



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

masukannya strategis untuk perbaikan serta mengefektifkan kerja-kerja advokasi, hukum dan politik AMAN.

1.1. Advokasi Kebijakan dan Hukum Nasional

1.1.1. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU PPHMA. Disamping itu, Presiden telah menunjuk 4 Kementerian yang bertindak sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU PPHMA ini.

Kementerian tersebut adalah :

- 1). Kementerian Kehutanan;
- 2) Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Kementerian Hukum dan HAM dan
- 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun Kementerian Kehutanan merupakan koordinator bagi 4 Kementerian ini, meskipun belum bisa dipastikan bahwa apakah penunjukkan Kemenhut sebagai koordinator tersebut merupakan amanat presiden atau kesepakatan 4 kementerian tersebut.

Pansus DPR RI telah melakukan kunjungan "konsultasi" ke tiga wilayah, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat. PB AMAN telah menyampaikan hal ini kepada Pengurus AMAN Daerah Sorong Barat dan Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Tengah serta aktivis masyarakat adat di Sumatera Barat terkait kunjungan Pansus DPR ini, dengan harapan mereka terlibat dalam konsultasi itu.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai Koordinator 4 Kementerian, telah menyampaikan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam RUU PPHMA, kepada Pansus DPR RI. DIM yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan tersebut sejauh ini masih sangat kental dengan isu-isu teknis dengan nuansa Kemenhut. Misalnya mengenai kriteria Masyarakat Adat disebutkan "*masih melakukan pemungutan hasil hutan*".

DIM ini juga secara umum masih melihat bahwa hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam sebagai hak yang diberikan oleh negara. Isu lain yang muncul dalam diskusi-diskusi adalah mengenai pelibatan Masyarakat Adat. DIM ini dapat dikatakan secara umum tidak menempatkan Masyarakat Adat sebagai "*Rights Holder*" (pemangku hak), tetapi sebagai pemanfaat. Ini persis seperti yang terdapat dalam UU 41/1999 mengenai Kehutanan dan bertentangan dengan RUU PPHMA yang secara tegas menyatakan hak-hak Masyarakat Adat. Kemensos, Kemenkumham dan Kemendagri menyatakan baru dilibatkan dalam penyusunan DIM serta menyayangkan sikap Kemenhut yang membahas DIM itu secara tidak terbuka.

AMAN mengikuti satu kali diskusi di Kemenhut (tanpa diundang) terkait dengan penyusunan DIM. Dalam diskusi tersebut, AMAN dipersilahkan menyampaikan pandangan tetapi sifatnya "tidak mengikat" karena rapat tersebut sesungguhnya hanya melibatkan 4 Kementerian. Tetapi selain 4 Kementerian, hadir pula



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Sekretariat Negara yang menyampaikan pandangan. Dalam pandangannya itu, Sekretariat Negara melihat isu Masyarakat Adat dalam RUU sangat "mengurangi" kewenangan negara. Oleh karena itu menurut pandangan wakil Sekretariat Negara, kewenangan Masyarakat Adat harus dibatasi oleh prinsip NKRI, Desentralisasi, HAM dan lingkungan. Secara singkat, pandangan ini merefleksikan "ketakutan" yang berlebihan terhadap kebangkitan Masyarakat Adat.

Untuk memantau perkembangan RUU PPHMA dan agenda-agenda Pansus DPR RI, Tim Advokasi AMAN menempatkan satu orang relawan yang bertugas sebagai informan, untuk memantau perkembangan dan berbagai informasi di DPR RI terkait RUU PPHMA. Sementara itu PB AMAN menyediakan dukungan dana dan narasumber kepada Pengurus Wilayah untuk melakukan pertemuan-pertemuan konsultasi dengan berbagai pihak untuk terus menggaungkan RUUPPHMA. Pertemuan-pertemuan ini memberikan masukan pada PB AMAN dalam mengawal dan menyusun masukan-masukan kepada Pansus DPR RI.

Beberapa kegiatan yang sedang berlangsung dan dipersiapkan oleh PB AMAN saat ini adalah:

- 1) Finalisasi DIM versi AMAN yang juga akan disampaikan kepada Pansus DPR RI. Berdasarkan informasi dari DPR, AMAN akan diundang oleh Pansus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
- 2) Bersama Epistema dan Fakultas Hukum UGM akan menyelenggarakan 1 lokakarya di Yogyakarta pada akhir Oktober ini, untuk sinkronisasi 3 RUU (RUU PPHMA, RUU Desa dan RUU Pertanahan) yang sekarang sedang dibahas oleh DPR RI. Selain itu, Lokakarya ini menjadi ajang "negoisasi" dengan Pansus RUU PPHMA, Panja RUU Pertanahan, dan Pansus RUU Desa. Dari pemerintah, juga akan hadir Kemenhut, ESDM, Kemendagri, BPN dan Kemenkumham.
- 3) Menyelenggarakan serangkaian diskusi terfokus di tingkat nasional terkait substansi RUU PPHMA untuk mematangkan masukan kepada Pansus DPR RI. Membangun gerakan bersama jaringan masyarakat sipil untuk mendorong substansi dan percepatan pembahasan serta pengesahan RUU PPHMA. Diskusi terfokus ini akan melibatkan Pansus DPR RI, 4 Kementerian terkait, akademisi, masyarakat sipil dan lain lain.
- 4) Melakukan aksi dan kampanye pada tingkat daerah, wilayah dan nasional sepanjang bulan November - Desember 2013, untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik itu Pemerintah Daerah maupun publik yang lebih luas. Diharapkan, Pengurus AMAN pada semua tingkatan, terlibat dalam menyuarkan secara lebih aktif tentang RUU PPHMA.

1.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat

Setelah lebih dari setahun gugatan AMAN tentang UU Kehutanan No. 41/1999, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013, MK mengeluarkan Putusan No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan Negara, bertentangan dengan konstitusi, sehingga kata Negara dihapuskan. Putusan ini mengembalikan hak atas hutan adat yang dikuasai negara, kepada Masyarakat Adat.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Pada tanggal 29 Mei 2013, AMAN menyelenggarakan Konsolidasi Nasional dengan semua pendukung gerakan Masyarakat Adat. Pertemuan tersebut menghasilkan strategi bersama mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk tingkat nasional dan daerah. Semua Pengurus Wilayah hadir kecuali PW AMAN Bali. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk menyepakati strategi AMAN merespon Putusan MK 35 ini.

Menyambut Putusan MK 35 ini, komunitas-komunitas anggota AMAN telah melakukan *Gerakan Plangisasi* dengan memasang plang-plang untuk menandai wilayah-wilayah adat dengan mencantumkan Putusan MK35 sebagai dasar gerakan. Dokumentasi dan Kampanye gerakan Plangisasi mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan disebarakan melalui berbagai media (cetak, online dan media sosial).

Hampir semua Pengurus Wilayah telah melaksanakan rangkaian sosialisasi putusan MK 35 yang berakhir dengan melanjutkan aksi *Plangisasi*. PB AMAN menyediakan dana sosialisasi Putusan MK sebesar Rp. 20.000.000,- per PW. Disamping itu, AMAN juga menyampaikan Putusan MK 35 dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, diantaranya: di wilayah Papua Barat oleh Yayasan PUSAKA, di Palu oleh Yayasan Merah Putih, di Sulawesi Selatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di Aceh pada saat Kongres JKMA, di Papua dilakukan langsung oleh Sekjen AMAN dll.

Di dunia internasional, Putusan MK 35 mendapatkan sambutan dan dukungan dari berbagai kalangan, baik pejabat pemerintah asing, jaringan Masyarakat Adat, donor, lembaga-lembaga PBB, maupun jaringan CSO. Berbagai pertemuan konferensi (nasional dan internasional), lokakarya, diskusi terfokus dll, dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisa serta mendiskusikan implementasi Putusan MK 35 dan mengundang AMAN sebagai narasumber.

Putusan MK 35 ini juga telah mempengaruhi kalangan bisnis. Beberapa perusahaan besar, diantaranya PT. GAR, meminta untuk bertemu dengan AMAN untuk berkonsultasi mengenai Putusan MK 35. Namun untuk sementara ini, PB AMAN memutuskan untuk menunda proses pertemuan dengan pihak bisnis.

Pada pihak pemerintah, Kemenhut telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait putusan MK. SE ini pada hakikatnya, hanya memberikan informasi kepada Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia mengenai isi Putusan MK 35. Namun, SE ini juga berpotensi menjadi persoalan sendiri. Pertama, SE ini hanya memberikan tafsiran yang sangat legalistik pada putusan MK 35. Kedua, SE ini tidak memberikan pencerahan kepada para pengambil kebijakan di daerah mengenai bagaimana seharusnya secara moral dan hukum melaksanakan putusan MK 35.

Pada tanggal 12 Maret 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi Bersama (NKB) 12 Kementerian/ Lembaga terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Nota Kesepakatan ini ditandatangani di Istana Negara yang disaksikan oleh Presiden RI bersama Ketua UKP4 dan Ketua KPK. NKB ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Rencana Aksi Tindak Lanjut dari NKB pada tanggal 31 Juli 2013 dimana Putusan MK 35 menjadi salah satu poin penting yang harus segera dikerjakan.

Sekjen AMAN terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut NKB 12 Kementrian/ Lembaga ini. Diskusi terakhir mengenai hal ini dilakukan di Kantor Dirjen PMD Kemendagri dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, Kemendagri, PU, Kemenkumham, KPK, AMAN, dan LSM nasional. Diskusi akhirnya memutuskan bahwa Kemendagri melalui Dirjen PMD akan menyusun Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Percepatan Pelaksanaan Putusan MK 35.

Rencana Tindak Lanjut Putusan MK 35 ke depan adalah:

- 1) Melakukan uji coba pelaksanaan Putusan MK 35 di tiga daerah. Daerah-daerah yang akan dipilih adalah daerah dengan 3 karakter dalam pengakuan terhadap Masyarakat Adat. *Pertama*, daerah dimana pengakuan hanya melalui SK Bupati. Ini dapat mengambil contoh Seko, Merangin dan Cisitu. *Ke-dua*, pengakuan oleh Perda. Ini bisa mengambil contoh Malinau, Kampar, dll. *Ke-tiga*, daerah di mana belum ada pengakuan. Namun untuk yang ke-tiga ini Direktorat Hukum dan HAM akan mengambil contoh yang paling mungkin untuk dicapai dengan cepat. Ini penting untuk membangun contoh sukses. Contoh sukses harusnya dibangun di daerah yang paling mungkin. Paling tidak, sudah ada komitmen dari Pemerintah Daerah.
- 2) Selain itu, juga akan didorong sosialisasi pada tingkat wilayah, bekerjasama dengan Pengurus Daerah AMAN, akademisi, Pemda dan DPRD. Inti dari sosialisasi ini diusahakan lebih fokus dari sosialisasi yang dilakukan sebelumnya. Sosialisasi yang akan dilakukan ini akan difokuskan pada membangun kesepahaman di tingkat wilayah dan daerah mengenai peta jalan pelaksanaan putusan MK 35 di wilayah dan daerah.
- 3) Petisi 30 Juta Tanda Tangan untuk Implementasi MK35 dan Pengesahan UUPPHMA. Hal ini dilakukan untuk mendesak pemerintah dan menyampaikan ke publik bahwa implementasi MK35 dan UUPPHMA adalah salah satu langkah untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Petisi ini dikoordinir oleh BPAN.

1.1.3. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

Pada tanggal 9 Juli 2013, DPR RI mengesahkan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). UU P3H ini sarat dengan pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi Masyarakat Adat. UU ini gagal memaknai 2 putusan MK sekaligus, yaitu putusan MK 45 thn 2011 mengenai legalitas kawasan hutan dan Putusan MK 35/ 2012 mengenai hutan adat. Kegagalan ini dapat dilihat dalam pemaknaan mengenai kawasan hutan. UU P3H ini masih beranggapan bahwa kawasan yang masih dalam status penunjukan merupakan kawasan hutan. UU ini juga gagal memaknai putusan MK 35 dimana tidak ada perbedaan antara mana yang hutan adat dan mana hutan negara. PB AMAN bersama dengan jaringan CSO melakukan konferensi pers untuk menolak UU ini. Sebelum diundangkan, AMAN dan CSO juga telah menolak RUU ini.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
 Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
 Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
 Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
 Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
 Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Rencana tindak Lanjut Advokasi UU P3H:

PB AMAN bersama dengan jaringan nasional telah menyepakati untuk melakukan Uji Materi atas UU P3H ini. Beberapa pertemuan telah dilakukan untuk membahas substansi UU P3H yang memberatkan Masyarakat Adat. AMAN akan menjadi salah satu pemohon dalam Uji Materi UU P3H ini. Saat ini Koalisi ini tengah memfinalisasi permohonan dan akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.

1. 2. Advokasi di Tingkat Wilayah dan Daerah

1. 2.1. Advokasi Kebijakan di Daerah

Perda Kabupaten Malinau: Pada tahun 2012, AMAN membantu DPRD Kab. Malinau membuat Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Malinau. Kerjasama tersebut dilanjutkan penyusunan Naskah Akademik dua Perda yaitu 1) Kelembagaan adat dan 2) Perda Perlindungan Lahan-lahan Pertanian. Naskah Akademik ini dipresentasikan di hadapan DPR Kab. Malinau pada tanggal 21 Oktober 2013.

Perda Kab Bulukumba. Saat ini PB AMAN dan PW AMAN Sulawesi Selatan, sedang melakukan penyusunan Ranperda untuk Kabupaten Bulukumba tentang Masyarakat Adat Kajang. Bupati Bulukumba telah mengeluarkan SK Bupati Penetapan Team Penyusun yang memasukkan 3 orang dari AMAN yakni : satu wakil PB AMAN, satu wakil PW AMAN Sulsel dan satu wakil Masyarakat Adat Kajang. Saat ini, tim tengah menyiapkan Naskah Akademik sebagai landasan RANPERDA.

Selain kedua Kabupaten tersebut, permintaan asistensi dari AMAN juga datang dari Kabupaten Bombana, Kabupaten Landak dan Kabupaten Manggarai untuk penyusunan Perda tentang Masyarakat Adat.

1. 2.2. Advokasi dan Penanganan Kasus Konflik

Kasus-kasus yang ditangani PB AMAN ini berada dalam level penanganan yang berbeda-beda, tergantung pada situasi di lapangan, solid tidaknya komunitas, serta kelengkapan data dan informasi yang dimiliki. Selama beberapa bulan terakhir PB dan PW AMAN melanjutkan pendampingan beberapa kasus konflik Masyarakat Adat. Antara lain¹

No.	Nama Kasus	Jenis Kasus	Perkembangan Kasus
1.	Kampung Muara Tae VS PT. Borneo Surya Mining Jaya (Provinsi Kalimantan Timur)	Perampasan wilayah adat untuk usaha perkebunan sawit	<ul style="list-style-type: none"> Pak Masrani (Kades Muara Tae) didampingi oleh Staff Advokasi dan HAM AMAN, mengikuti pertemuan RSPO, dimana Pak Masrani mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan kasus yang terjadi di wilayah adatnya. Plangisasi telah dilakukan oleh masyarakat Muara Tae namun plang hutan adat tersebut dicabut dan tidak ada masyarakat yang mengetahui siapa

¹Untuk mengatahuikasinisebelumnya, lihat Laporan Rakernas III, Tumbang Malahoi, Kalimantan Tengah.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

			<p>pelakunya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses hukum di PTUN sementara dilakukan dengan dampingan pengacara tingkat nasional dan lokal di Kalimantan Timur. AMAN sedang melakukan pendampingan di pengadilan terhadap Kampung Muara Tae juga terhadap Pak Masrani sebagai petinggi kampung yang diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Bupati Kutai Barat, termasuk mendampingi secara hukum dalam melakukan gugatan kepada Bupati Kutai Barat. Proses pengadilan masih berlangsung. Sampai saat ini telah dilakukan 2 kali pemeriksaan atas perkara dan pada tanggal 16 Oktober akan dilakukan pemeriksaan ke-tiga. PB AMAN akan memfasilitasi 1 orang advokat dari Jakarta untuk mendampingi Pak Masrani tiap kali persidangan • Masyarakat telah mempunyai peta yang dibuat beberapa tahun lalu. Investigasi masih terus dilakukan oleh PW AMAN Kaltim dengan bantuan PB AMAN • Terkait pelatihan negosiasi, ditunda karena pertimbangan urgensi dan digantikan dengan proses rehabilitasi wilayah adat yang dicanangkan langsung oleh Sekjen AMAN. • Pada tanggal 19 September 2013, Sekjen AMAN telah melakukan pencaangan rehabilitasi hutan adat di Muara Tae dengan harapan dapat menjadi awal gerakan rehabilitasi di semua wilayah adat anggota komunitas AMAN di seluruh Nusantara. Hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh AMAN untuk mereklaim tanah yang telah ditanami kelapa sawit oleh pihak PT. BSMJ.
2.	Negeri Paperu VS PT. Maluku Diving and Tourism (Provinsi Maluku)	Perampasan wilayah (adat) laut untuk usaha pariwisata <i>Cape Paperu Resort and Spa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tanggal 19 Agustus, PB AMAN bersama PW AMAN Maluku, melakukan pertemuan Komunitas di Negeri Paperu. Pertemuan ini menghasilkan rencana strategi tindak lanjut yang hingga saat ini telah dilaksakan oleh komunitas, maupun PB dan PW AMAN Maluku. • Plangisasi telah dilaksanakan oleh komunitas namun plang tersebut dicabut kembali sebelum kunjungan gubernur ke Paperu. Tidak ada yang mengetahui siapa yang mencabut plang tersebut. • Peta hasil pemetaan partisipatif di Paperu masih dalam proses finalisasi dan peta tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan peraturan negeri dan akan dilampirkan. • Surat kecamatan oleh PB AMAN telah dikirimkan kepada Komnas HAM dan kedutaan Swiss di Jakarta. Surat PB AMAN telah dijawab dan komunitas Paperu bersama sekjen telah bertemu langsung dengan pihak kedutaan, namun surat kepada Komnas HAM belum dijawab sampai saat ini. • PW AMAN Maluku bersama konsultan hukum dan



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

			<p>pengacara masyarakat adat di Maluku tengah memproses langkah hukum terhadap PT. Maluku Diving and Tourism.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat negeri Paperu bersama Sekjen AMAN telah bertemu langsung dengan perwakilan Duta Besar Swiss di Indonesia untuk mendiskusikan kasus yang sedang terjadi. Selanjutnya, pertemuan juga dilakukan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari hasil pertemuan tersebut, pihak kementerian memberikan komitmen untuk melihat sengketa ini, serta menyatakan bahwa tidak ada yang dapat membenarkan pengklaiman wilayah laut yang merupakan hak kolektif masyarakat setempat. Pengurus Wilayah Maluku Tengah mempersiapkan usaha proses hukum terhadap PT. Maluku Diving and Tourism yang diduga melanggar hak-hak masyarakat adat Paperu. Komnas HAM juga terlibat sebagai mediator dalam penanganan kasus ini.
3.	Komunitas Adat Pandumaan dan Sipituhuta VS PT. Toba Pulp Lestari (Provinsi Sumatera Utara)	Perampasan wilayah hutan kemenyan untuk perkebunan Eukaliptus	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta telah bertemu langsung dengan pihak kementerian kehutanan, dan dari pertemuan tersebut, Dirjen Bina Usaha Kehutanan menegaskan kepada pihak PT. TPL untuk tidak melakukan aktifitas apa-apa di atas tanah adat Pandumaan dan Sipituhuta. Namun demikian, pada pertengahan September 2013, masyarakat menangkap tangan PT. TPL masih terus beraktifitas di wilayah hutan kemenyan mereka dan hal ini sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian resort Humbahas, serta pihak Kementerian kehutanan untuk ditindak tegas. Dirjen BUK menawarkan kerjasama melalui skema kemitraan dengan PT. TPL, tetapi ditolak oleh komunitas. PB AMAN bersama dengan PW AMAN Tano Batak dan KSPPM serta masyarakat sipil lain di Sumatera Utara akan bersama-sama bekerja untuk segera menghasilkan Perda Pengakuan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta. Dengan adanya Perda ini maka agenda lanjutannya adalah mengusahakan agar hutan kemenyan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan dari hutan negara. Selain itu, langkah-langkah proaktif juga telah dilakukan oleh AMAN, baik di tingkat lokal, nasional, maupun tingkat internasional, dimana saat ini ada wacana perumusan Perda tentang masyarakat adat di kabupaten Humbang Hasundutan. Advokasi media tetap dilakukan dan kampanye terkait pelanggaran hak masyarakat adat oleh PT. TPL terus dilaksanakan. Pada tingkat internasional, kasus ini telah beberapa kali



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

			<p>dilaporkan kepada pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat dan terus dikampanyekan dalam berbagai forum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PB AMAN dibantu oleh jaringan Internasional akan membuat laporan kepada ILO 111, tentang perampasan hak hidup dari Komunitas Pandumaan Sipituhuta.
4.	Komunitas Adat Cek Bocek VS PT. Newmont Nusa Tenggara (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Perampasan wilayah adat untuk aktifitas tambang emas	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus ini berlangsung sejak tahun 1986. Wilayah Adat Komunitas Cek Bocek menjadi target PT. NNT untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang emas. Terjadi berbagai intimidasi dan tekanan pada komunitas. Komunitas melakukan berbagai cara untuk melawan. AMAN mendampingi kasus dengan memperkuat status keberadaan komunitas, melakukan pemetaan dan penguatan kapasitas. • Kasus ini melibatkan pemerintah daerah dan Universitas Indonesia yang dibayar oleh PT. NNT untuk melakukan penelitian yang memojokkan komunitas. Oktober 2012, terjadi pembakaran rumah adat oleh orang tak dikenal. Hal ini sudah dilaporkan ke polisi. Kasus ini masih ditangani oleh PB AMAN bersama dengan PW AMAN Sumbawa. Sampai saat ini, masyarakat masih terus melawan PT. NNT, masyarakat melaksanakan putusan MK 35 melalui penanaman patok di wilayah adat mereka namun dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada polisi daerah setempat. • 3 orang anggota komunitas telah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian terkait tuduhan merusak fasilitas perusahaan. PB AMAN sedang mengkonsolidasikan pengacara untuk mendampingi komunitas.
5.	Komunitas Adat Musi Banyuasin VS Puluhan Perusahaan Perkebunan (Provinsi Sumatera Selatan)	Perampasan wilayah adat untuk usaha perkebunan	<p>PB AMAN bersama Komnas HAM melakukan kunjungan ke 3 marga di Kab. Musi Banyu Asin untuk meninjau konflik antara masyarakat adat di tiga marga ini dengan puluhan perusahaan perkebunan di wilayah itu. Komnas HAM telah mengeluarkan surat kepada Bupati dan Kapolres Musi Banyu Asin agar segera menindaklanjuti penyelesaian konflik yang ada. Sampai September 2013, konflik terus terjadi, namun desakan penyelesaian konflik dan dukungan terus berdatangan dari semua pihak, terutama dari AMAN dan komunitas anggota.</p>
6.	Karonsie Dongi VS PT. Vale Indonesia (Provinsi Sulawesi Selatan)	Perampasan wilayah adat untuk usaha tambang nikel	<p>Dimulai sejak 1968 dan masih berlangsung hingga sekarang. September 2012, perusahaan bermaksud memindahkan Komunitas Karonsie dari wilayah adatnya. Dengan dukungan jaringan AMAN di seluruh Nusantara yang mengirimkan sms kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, perusahaan dan pihak kepolisian. Untuk sementara, maksud ini dapat ditahan. Advokasi kasus masih</p>



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

			berlangsung. AMAN Wilayah Tana Luwu mendampingi Komunitas Karonsie untuk masuk dalam perundingan tahap selanjutnya.
7.	Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa VS Pemerintah Propinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa	Perampasan wilayah adat untuk Hutan Lindung	Kasus Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa, NTB dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pada Bulan November 2011, Pemukiman Masyarakat Adat Pekasa dibakar oleh Tim Khusus yang terdiri dari tentara, polisi hutan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kasus ini menyebabkan Datuk Pekasa, Edi Kuswanto ditahan. Proses pengadilan sudah berlangsung sebanyak 12 kali. Sekjen AMAN turut menjadi saksi ahli untuk mendukung komunitas ini. Saat ini sedang menunggu keputusan pengadilan. Pada Bulan November 2012, Pengadilan memutuskan penjara 1,5 tahun terhadap Datuk Pekasa. Atas keputusan ini, Datuk Pekasa menyatakan banding. Bersama dengan AMAN Daerah Sumbawa, AMAN berusaha membebaskan Datuk Pekasa melalui jalur hukum dengan membuat Kasasi ke Mahkamah Agung, yang saat ini sedang dalam proses.
8	Rakyat Penunggu Sumatera Utara VS PTPN II	Perampasan lahan untuk perkebunan sawit	Berdasarkan rencana, utusan dari Masyarakat Adat Rakyat Penunggu akan melakukan dialog dengan BPN pihak lainnya yang terkait, di Jakarta. Namun proses ini ditunda, menunggu Pilkada Deli Serdang selesai.
9.	Talang Mamak VS 18 Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten	Perampasan wilayah adat untuk sawit, minyak, gas, transmigrasi, HTI dan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> Selain kasus-kasus di atas, pada Januari 2013, suatu pertemuan dilakukan bersama dengan Komunitas Adat Talang Mamak di Riau. Komunitas Talang Mamak mengalami penindasan yang masif dan telah kehilangan berbagai elemen penting dari suatu eksistensinya sebagai komunitas adat. Bentuk-bentuk penindasan yang menjurus pada pemusnahan budaya (<i>cultural genocida</i>) ini memerlukan suatu penanganan khusus. Oleh sebab itu, Deputi II bersama dengan komunitas Talang Mamak menyusun suatu strategi bersama untuk mengadvokasi-kasus ini hingga beberapa tahun ke depan. Pada tanggal 14 September 2013, kembali dilakukan pertemuan komunitas Talang Mamak di Inhu yang secara khusus dilakukan untuk membahas kasus konflik. Terdata 18 perusahaan melakukan pelanggaran di wilayah adat Talang Mamak, mulai dari minyak dan gas, sawit, HTI, transmigrasi dan hutan lindung. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembentukan Tim Advokasi Talang Mamak yang terdiri dari 6 orang, untuk melanjutkan pendataan kasus dan melakukan pendampingan di lapangan. Komunitas Talang Mamak berencana melakukan pemasangan plang-plang wilayah adat secara serentak pada tanggal 20 Oktober 2013.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

10.	Komunitas Adat Seko VS PT. Seko Fajar	Perampasan wilayah adat untuk HGU	<ul style="list-style-type: none"> • PT Seko Fajar Plantation mendapatkan HGU di atas lahan seluas 23.718 hektar, berdampak pada masyarakat adat di 7 Desa di Seko. • Putusan PTUN Jakarta Nomor 35/G/2012/PTUN-JKT memenangkan PT. Seko Fajar dalam sengketa dengan pihak Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). • PB AMAN bersama PW AMAN Wilayah Tana Luwu sedang mengkaji kasus ini dan menentukan strategi penanganan kasus ini.
-----	---------------------------------------	-----------------------------------	--

Selain kasus-kasus tersebut, masih terdapat banyak kasus yang sedang ditangani oleh PB AMAN bersama dengan PW dan PD AMAN, antara lain :

- 1) Kasus antara Masyarakat Adat Wawiyai dengan Pemda Raja Ampat, terkait dengan pelepasan tanah milik Masyarakat Adat untuk kepentingan Pemda.
- 2) Kasus Dampak *Resettlement* dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Komunitas Dayak Punan Dulau di Kabupaten Bulungan, Punan Setarap di Kabupaten Malinau dan Punan Sega di Kabupaten Berau.
- 3) Kasus Illegal Logging oleh PT. Akhates Plywood dan PT. Fortuna Cipta Sejahtera vs Komunitas Dayak Punan Kumbang Tunjang dan Komunitas Kumbang Topus Kalimantan Tengah.
- 4) Dampak penelitian CIFOR, penganugerahan Kalpataru Setulang dan tumpang tindih perijinan eksploitasi SDA pada Komunitas Masyarakat Adat Desa Setarap, Punan Setarap, Adiu, Gong Solok, Kab. Malinau Kalimantan Timur yang menyebabkan konflik horizontal dan vertical yang cukup parah;
- 5) Konflik antara Suku Sawai di Halmahera Tengah dengan perusahaan tambang, PT. Weda Bay Nickel dan PT. NHM.
- 6) Kasus Komunitas Masyarakat Adat Semende Nasal di Bengkulu, dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- 7) Kasus Komunitas Adat Modang Long Way di Desa Long Bentuk, Kaltim dengan PT. Gemilang Sejahtera Abadi (sawit).
- 8) Kasus Komunitas Adat Dayak Meratus dengan Pemerintah terkait dengan Kepercayaan/Agama Asli.
- 9) 9). Kasus Kepulauan Aru dengan pemerintah, terkait rencana konsesi 500 ribu Ha untuk perkebunan tebu.
- 10) Kasus Masyarakat Adat di Seram Barat dengan pemerintah terkait rencana pengembangan perkebunan sawit dll.

Kasus-kasus yang ditangani berada dalam level penanganan yang berbeda-beda, tergantung pada situasi di lapangan, solid tidaknya komunitas, serta kelengkapan data dan informasi yang dimiliki. Untuk itu PB AMAN melakukan serangkaian peningkatan kapasitas penanganan dan pendokumentasian kasus. Pada tanggal 3-6 Agustus yang lalu, dilakukan Training Advokasi Berbasis Dokumentasi Jurnalistik sekaligus mengkonsolidasikan Biro Advokasi PW AMAN. Training ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam merekam, mendokumentasikan dan melaporkan kasus-kasus yang terjadi di komunitas serta menentukan strategi yang tepat untuk penanganannya. Training ini masih akan diteruskan dengan training-training serupa untuk memperbanyak jumlah pengurus AMAN yang memiliki ketrampilan dokumentasi dan advokasi.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

1.3. Advokasi Regional dan Internasional

1.3.1. Regional - ASEAN

Perkembangan terakhir di ASEAN terkait dengan masyarakat adat ditandai dengan hadirnya perwakilan Indonesia untuk AICHR di Gambia bersama-sama dengan AMAN dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Masyarakat Adat untuk membicarakan tentang masyarakat adat di ASEAN. Dari hasil pembicaraan tersebut dan dengan desakan berbagai pihak, akhirnya setelah EMRIP 2013, perwakilan AICHR bersama dengan salah satu komisioner Komnas HAM dan juga AMAN mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk membicarakan posisi masyarakat adat di Indonesia dan tantangan pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah, khususnya di tingkat ASEAN. Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan pada bulan Oktober 2013 dengan menghadirkan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

1.3.2. Mekanisme HAM PBB

Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik

Pada bulan Juli 2013 bersamaan dengan kegiatan Mekanisme Pakar untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP), Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik (CCPR) juga mengadakan pengujian terhadap Negara Indonesia terkait dengan proses implementasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Delegasi AMAN dari Deputi Advokasi, Hukum, dan Politik turut mengambil bagian dalam acara tersebut. Bersama-sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia, AMAN menyampaikan pelanggaran-pelanggaran hak Sipil dan Politik yang dihadapi oleh masyarakat adat, termasuk di dalamnya proses kriminalisasi dan meningkatnya konflik agraria. Setelah beberapa hari mengikuti kegiatan dan melakukan lobi-lobi, dalam *concluding observation* oleh CCPR, kurang mengangkat isu masyarakat adat di Indonesia. Isu masyarakat adat "ditutupi" isu kekerasan terhadap Ahmadiyah, dan beberapa isu politik lainnya. Dengan demikian, disadari bahwa AMAN harus meningkatkan proses berjangkauan dan memperbanyak keterlibatan dalam mekanisme *treaty bodies* PBB karena selain untuk meningkatkan *visibilitas* tetapi juga dapat membuat ahli independen CCPR lebih terupdate serta lebih memahami isu-isu pelanggaran hak masyarakat adat yang sedang terjadi di Indonesia.

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indonesia akan di uji oleh komite PBB untuk hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) pada pertengahan tahun 2014 mendatang. Setelah beberapa kali rapat persiapan dan koordinasi di tingkat nasional, AMAN bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya di Indonesia telah memasukan laporan bayangan kepada CESCR untuk dipertimbangkan dan diangkat menjadi daftar isu-isu terkait dengan proses implementasi konvensi hak Ekosob yang akan dipertanyakan kepada pemerintah Indonesia nanti. Dalam laporan bayangan tersebut, kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat adat dari berbagai daerah diangkat untuk menjadi contoh nyata pelanggaran hak Ekosob masyarakat adat oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, AMAN bersama organisasi masyarakat sipil yang lain sedang menunggu waktu pertemuan pra sesi yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2013 di Jenewa.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Mekanisme Pakar untuk Hak-Hak Masyarakat Adat

Utusan AMAN juga turut serta dalam sesi ke-enam proses Mekanisme Pakar untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP) yang diselenggarakan di Jenewa, bulan Juli 2013, dimana di dalamnya AMAN turut serta menyelenggarakan salah satu *Side Event* dengan Tema: *Peace and Security, and Access to Justice*. Selain itu juga Utusan AMAN menjadi salah satu narasumber dalam forum diskusi industri ekstraktif dan *access to justice*. EMRIP sesi ke-enam menjadi forum dimana AMAN mengkampanyekan tentang pentingnya eksistensi peradilan adat sebagai penyokong peradilan nasional.

World Conference on Indigenous Peoples/WCIP

PBB telah menetapkan bahwa pada Bulan September 2014, akan dilakukan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat (*The World Conference on Indigenous Peoples-WCIP*) di Markas PBB, New York. Pertemuan ini akan dilakukan bersamaan dengan Sidang Umum PBB yang akan dihadiri oleh semua Negara anggota PBB dan utusan-utusan Masyarakat Adat dari seluruh dunia. Untuk ini, telah dibentuk *Indigenous Global Coordinating Group* (Kelompok Koordinasi Global Masyarakat Adat) yang terdiri dari utusan semua Region. Rukka Sombolinggi mewakili AMAN untuk duduk dalam *Global Coordinating Group* ini pada tingkat Asia.

Untuk mempersiapkan konferensi dunia tersebut, dilakukanlah suatu pertemuan persiapan global (*Global Preparatory Meeting*) yang dilaksanakan di Alta, Norway, pada tanggal 8 s/d 12 Juni 2013 sebagai tuan Rumah, *Sammi Council*, Kelompok Masyarakat Adat di Norway. Pertemuan ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang dari isu-isu kunci yang berkaitan dengan hak-hak Masyarakat Adat untuk disampaikan kepada PBB sebagai masukan resmi dari Masyarakat Adat. Dari AMAN dalam pertemuan ini hadir Sekjen AMAN, Staff Khusus Sekjen dan Deputi II.

1.3.3. Badan-Badan Pembangunan dan Mekanisme Pendanaan Internasional

***Dedicated Grant Mechanism/DGM* dari FIP - Bank Dunia**

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, sejak 2009, AMAN secara aktif memantau dan terlibat dalam proses terkait dengan *Forest Investment Program* (FIP) Bank Dunia. Dalam FIP, terdapat alokasi pendanaan khusus untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang disebut *Dedicated Grant Mechanism* (DGM). Dana ini secara total berjumlah 50 juta USD, dialokasikan untuk program di tingkat global dan nasional di 8-negara pilots FIP, termasuk Indonesia. Dari total dana yang ada tersebut, Indonesia akan mendapatkan 6,5 juta USD.

Sehubungan dengan itu, AMAN memandatkan kepada Dewan Kehutanan Nasional, secara khusus, Kamar Masyarakat, untuk memfasilitasi proses sosialisasi, konsultasi dan pembentukan *Steering Committee* (Panitia Pengarah) Nasional untuk DGM di Indonesia. Panitia Pengarah Nasional bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan DGM di tingkat nasional, serta memutuskan hal-hal penting terkait pendanaan ini, termasuk menyetujui proposal-proposal dari komunitas adat dan komunitas lokal yang kelak akan masuk kepada DGM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka pada tanggal 26-27 Agustus 2013, dilakukanlah suatu pertemuan konsultasi nasional dengan utusan-utusan



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Masyarakat Adat, utusan Komunitas Lokal, dan anggota-anggota DKN Kamar Masyarakat. Konsultasi ini juga dihadiri oleh Bank Dunia dan ADB. Dalam pertemuan ini, AMAN menjadi narasumber utama, karena mengikuti secara dekat sejak proses hingga lahirnya pendanaan ini di FIP.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan serta menyetujui DGM sebagai salah satu sumber pendanaan yang dapat diakses oleh komunitas untuk mengembangkan gagasan dan inisiatifnya terkait pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pertemuan ini juga menyepakati suatu rangkaian tindak lanjut untuk memastikan terpilihnya Panitia Pengarah Nasional DGM Indonesia. DKN mendapatkan mandat untuk melanjutkan proses ini. Saat ini, DKN Kamar Masyarakat sedang melakukan finalisasi *Concept Notes* yang akan disampaikan kepada Bank Dunia, untuk melanjutkan proses tersebut. Dalam konteks ini, AMAN tetap terlibat untuk memastikan proses berjalan dengan lancar.

Peninjauan Kerangka Pengaman, Bank Dunia

Bank Dunia saat ini sedang meninjau kembali semua Kerangka Pengaman yang mereka miliki untuk melihat kembali secara kontekstual, apakah semua Kerangka Pengaman tersebut mampu menjawab tantangan dari berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Masyarakat Adat adalah mengenai FPIC. Selama ini, Bank Dunia selalu menolak menggunakan “*Consent*” (Persetujuan) sebagai bagian dari proses pelaksanaan *project* mereka. Sebagai gantinya, digunakan “*Consultation*” (Konsultasi) yang tidak berimplikasi pada direstui atau tidaknya suatu *project* berjalan, oleh komunitas Masyarakat Adat dimana *project* berada. Masyarakat Adat akan memastikan perubahan terjadi dalam Kerangka Pengaman Bank Dunia, dari “*Consultation*” kepada “*Consent*”. Awal November yang akan datang, 8 orang Utusan AMAN akan terlibat dalam pembahasan Regional Kerangka Pengaman ini di Philipina.

1.3.4. Pertemuan dan jaringan Internasional

Pengembangan Jaringan HAM di Tingkat Internasional

AMAN melakukan komunikasi-komunikasi intensif dengan berbagai organisasi internasional baik yang bekerja secara umum untuk isu HAM maupun secara khusus untuk isu masyarakat adat. Selain organisasi-organisasi internasional tersebut, AMAN juga mencoba berjejaring dengan anggota-anggota *treaty bodies* dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas dan membuat orang-orang sekitar lebih mengetahui dan memahami isu masyarakat adat di Indonesia serta urgensi-urgensinya. Forum tentang Bisnis dan HAM yang ke-dua akan dilaksanakan di Jenewa pada bulan Desember 2013. Saat ini AMAN telah menyampaikan keinginan untuk juga terlibat dalam forum tersebut. Proses seleksi sedang dilakukan dan akan disampaikan kembali dalam waktu dekat.

International Conference on Securing Land and Resource Rights

Pada tanggal 19-20 September 2013, *Rights and Resources Initiative* (RRI) bekerjasama dengan OXFAM dan ILC, melaksanakan suatu konferensi internasional di Interlaken, Switzerland, tentang isu-isu penting terkait pengakuan atas tanah dan wilayah komunitas. Pertemuan ini dihadiri oleh 100-an peserta dari berbagai Negara dan berbagai profesi; NGOs, Masyarakat Adat, pemerintah dan kalangan bisnis.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

AMAN menjadi salah satu penyelenggara dari 4 Kelompok Diskusi, yakni yang berkaitan dengan Pemetaan Partisipatif. Untuk itu, Deputi III mengutus Rukka Sombolinggi dan Yoga Plee untuk mempersiapkan event tersebut. AMAN juga menjadi salah satu narasumber utama dalam diskusi tersebut. Selain itu, untuk kelompok diskusi yang berkaitan dengan pengakuan legal atas tanah dan wilayah, Deputi II menjadi salah satu narasumber utama untuk pengantar diskusi, terkait dengan gerakan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan legal, termasuk Putusan MK 35.

1.4. Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat

Tujuan strategis:

Menghadirkan para juru bicara dan perutusan (representasi) politik Masyarakat adat yang militan dan terpercaya untuk memperjuangkan pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak Masyarakat Adat dalam seluruh kebijakan politik negara dan memastikan kewajiban negara kepada Masyarakat adat melalui sistem demokrasi yang tersedia, baik demokrasi langsung dalam bentuk advokasi kebijakan maupun lewat jalur demokrasi representasi yang disediakan melalui PEMILU dan PEMILUKADA.

Capaian-capaian strategis:

1. Masyarakat Adat terlibat secara aktif dalam proses-proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada berbagai tingkatan, daerah maupun nasional
2. Masyarakat Adat memiliki utusan-utusan dalam ruang-ruang politik negara, baik di tingkat daerah kabupaten/ kota dan provinsi maupun pusat.

Intervensi program PB AMAN akan dilakukan melalui: (1) penguatan kapasitas politik Masyarakat Adat, (2) Pendampingan kader/ Jaringan kader, (3) Analisis politik dan pemenangan kader dalam PEMILU dan PEMILUKADA, (4) penguatan eksistensi politik AMAN di tingkat regional & internasional

Pemilu 2014 telah hampir tiba. Saat ini telah terdaftar 181 Caleg Masyarakat Adat dari berbagai wilayah, dengan rincian : 138 Caleg DPRD Kabupaten/ Kota; 24 Caleg DPRD Provinsi dan 19 Caleg Pusat (DPR RI dan DPD RI). PB AMAN telah menyusun suatu strategi untuk mendukung Caleg-Caleg Masyarakat Adat ini melalui berbagai media yang dapat digunakan dengan kapasitas yang tersedia. PB AMAN merencanakan untuk mengkonsolidasikan Caleg-Caleg ini dalam waktu dekat.

PB AMAN memberikan dukungan kepada AMAN Maluku Utara untuk melakukan konsolidasi anggota AMAN di Maluku Utara dalam PilGub Maluku Utara yang lalu. PB AMAN juga memberikan dukungan kepada PW AMAN Sumatera Utara, PD AMAN Deli dan PD AMAN Serdang, untuk mengkonsolidasikan anggota AMAN untuk Pilkada Deli Serdang yang akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober yang akan datang.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

PB AMAN telah melakukan pendataan ulang kader-kader Masyarakat Adat yang duduk dalam ruang-ruang politik, serta kader-kader potensial yang hendak terlibat dalam politik praktis. Suatu strategi untuk membangun gerakan politik AMAN telah mulai dibangun bersama dengan DAMANNAS. Selanjutnya PB AMAN akan menunjuk staf/ pejabat khusus AMAN untuk urusan Politik.

1.5. Pembentukan Law Firm dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) sebagai Organisasi Sayap AMAN

Dalam upaya untuk mengefektifkan layanan hukum untuk anggota AMAN yang mengalami kasus konflik, AMAN mulai membangun wacana untuk mendirikan Law Firm AMAN pada tingkat wilayah. Berdasarkan rencana, 20 Law Firm AMAN akan berdiri di 20 wilayah dan akan dikawal oleh PW AMAN. PW AMAN Tana Luwu bersama dengan pengacara-pengacara hukum Masyarakat Adat di Tana Luwu telah membentuk Law Firm ini dengan membuat akta notaris, pada tanggal 21 November 2012. PW lainnya diharapkan segera menyusul membentuk Law Firm-Law Firm sendiri.

Sehubungan dengan hal ini pula, pada tanggal 25 s/d 27 September 2013, telah dilakukan Konferensi Pertama Para Pengacara Masyarakat Adat Se-Nusantara. Konferensi ini dihadiri oleh 29 Pengacara utusan 14 PW dari 20 PW AMAN. Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) sebagai Organisasi Sayap AMAN. 28 dari 29 peserta Konferensi telah tercatat sebagai anggota resmi PPMAN. Disamping itu, konferensi juga menetapkan Statuta, Program Kerja serta Deklarasi PPMAN dan memilih Pengurus PPMAN. Saudara Mualimin Apenk (Sumsel) terpilih sebagai Ketua PPMAN untuk Periode 2013 - 2016.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

BAGIAN II.

Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan: Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat

Untuk menerjemahkan mandat KMAN IV urusan Pembedayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat AMAN telah memiliki Program untuk periode Mei 2014-April 2017 dan telah disahkan dalam Rapat Kerja Nasional AMAN ke III di Tumbang Malahoi, Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2013.

Program prioritas yang harus diimplementasikan sejak Juli 2013 s/d April 2017 masih berbasis pada ketersediaan sumber daya manusia/ staf PB AMAN yang saat ini telah memiliki struktur kerja untuk urusan ekonomi dan dukungan terhadap komunitas. Sementara pelayanan urusan pendidikan dan kebudayaan sampai Juli 2013 belum memiliki staf, sehingga untuk bidang ini ditangguhkan pembahasannya dan akan jadwalkan ulang perumusannya segera setelah ada staf atau sumber daya manusia yang mengawalinya.

Dengan sumber daya yang terbatas inilah dioptimalkan untuk mendukung percepatan dan implementasi program kerja yang telah disahkan tersebut. PB AMAN juga harus bekerja keras untuk membenahi kekurangan serta meningkatkan kinerja seluruh perangkat organisasi agar benar-benar bisa menjalankan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat adat yang sudah bergabung dan menjadi anggota AMAN.

2.1. Penguatan Ekonomi

Tujuan strategis:

Mengembangkan produk dari pengelolaan sumberdaya alam lestari dan kreatifitas berbasis budaya dan pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas kepada anggota-anggota AMAN melalui kerjasama/ kemitraan dengan berbagai pihak. Baik instansi pemerintah maupun lembaga/ organisasi non-pemerintah.

Capaian-capaian strategis:

1. Tersedia kader-kader penggerak ekonomi di seluruh daerah basis anggota AMAN yang memiliki kapasitas dalam pengembangan produk dan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas (cikal bakal sekolah ekonomi komunitas)
2. Tersedia skema dan sumberdaya di AMAN untuk penguatan kelembagaan ekonomi dan pengembangan produk terhadap komunitas-komunitas adat anggota AMAN
3. Tersedia akses terhadap dana hibah dan permodalan untuk pengembangan ekonomi di AMAN
4. Tersedia jaringan promosi dan akses pemasaran terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat adat anggota AMAN
5. Tersedia mekanisme internal antara PB, PW dan PD AMAN untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat adat yang cepat dan efektif
6. Ada koperasi primer (Koperasi AMAN Mandiri) yang berbadan hukum dan mulai operasional pada tahun 2013.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

7. Ada produk strategis (unggulan) dari 15 komunitas adat yang dikembangkan dan terjamin akses pasar (2014)
8. Ada 15 koperasi di tingkat komunitas anggota AMAN (2014)
9. Ada CU di PB AMAN (terbentuk Nov. 2013)
10. Ada CU di 3 komunitas adat yang sudah beroperasi dengan standar GCU-FPK (2014)
11. Ada 1 koperasi sekunder nasional (2015)
12. Ada 2 asosiasi usaha terbentuk di bawah AMAN (CGGM, Craft & Ekonomi Kreatif, Ekowisata) (2015)

Intervensi program PB AMAN akan dilakukan melalui: (1) Pengelolaan data dan penyebaran informasi usaha dan ekonomi yang lebih luas, (2) Sekolah untuk pengembangan ekonomi komunitas, (3) Pemilihan produk-produk strategis yang berdampak luas secara sosial dan ekologis, (4) Pengembangan kelembagaan ekonomi kolektif berupa koperasi primer lokal dan sekunder nasional, Kelompok usaha bersama (KUB), Credit union (CU) dan asosiasi usaha-usaha unggulan, dan (5) Pengembangan perusahaan-perusahaan sesuai kebutuhan usaha.

2.1.1. Penguatan Ekonomi Masyarakat Adat

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat adat selama periode Mei 2012 s/d Januari 2013 yang sudah dilakukan adalah:

- 1) Pendampingan Pengembangan Koperasi AMAN Mandiri.
- 2) Pendampingan *Community Green Gold Mining* (CGGM) di Kasepuhan Cisitu, Banten.
- 3) Training fasilitator pengembangan usaha komunitas masyarakat adat bagi Biro Ekosob PW AMAN yang juga menghasilkan terbentuknya Pembentukan Jaringan Fasilitator Usaha Komunitas Masyarakat Adat (JFUKMA). AMAN tetap mendampingi Biro-biro Ekosob Wilayah untuk mempercepat layanan penguatan ekonomi kepada anggota.
- 4) Mempersiapkan pengelolaan dana hibah untuk mendukung usaha Komunitas Anggota dan Kelompok Usaha Perempuan AMAN melalui Program SICoLiFe. Hibah ini mulai diberikan pada bulan November 2013.
- 5) Pengembangan CU AMAN telah melewati beberapa tahap: Penanda Tanganan MoU antara GPPK - AMAN Tanggal 12 Februari 2013. Pengidentifikasian Calon Komunitas anggota AMAN yang akan mendirikan CU untuk tahap pertama ada 5 wilayah yang menyanggupi antara lain; Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Rapat Pembentukan dan Pengembangan CU Ala Masyarakat Adat. Saat ini AMAN telah menyelesaikan Rencana Kerja dan Tahapan Pendirian Credit Union untuk Staf PB AMAN dan pendukung AMAN di JABODETABEK

Dalam waktu 6 bulan, Koperasi AMAN mandiri akan memfasilitasi pembentukan cabang-cabang Koperasi Produksi AMAN Mandiri untuk tahun 2013-2014 akan dibentuk minimal 3 Cabang.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

2.1.2. Pengembangan Produk Masyarakat Adat dan Pemasaran

Sampai saat ini, pengembangan Produk masyarakat adat dan pemasaran masih didukung sepenuhnya oleh Program SICO LIFE. Beberapa perkembangan yang dapat dilaporkan saat ini adalah:

- 1) Asesmen produk-produk unggulan dari komunitas-komunitas dalam rangka mempersiapkan dana hibah dan penyediaan suply untuk Gerai Nusantara. Asesmen ini terus dilakukan secara bersama oleh PB dan Biro Ekosob pada wilayah masing-masing.
- 2) Pengembangan Gerai Nusantara di Rumah AMAN Bogor dan saat ini telah tersedia 60 jenis produk masyarakat adat
- 3) Gerai Nusantara telah 2 kali melakukan Pameran produk-produk masyarakat adat, di IPB Bogor dan pada Ulang Tahun Indonesia Maritime Institute.
- 4) Untuk memastikan ketersediaan produk di Gerai Nusantara maka Pengurus Besar memfasilitasi semua Biro Ekosob untuk melakukan pengadaan barang secara langsung sambil menunggu kesiapan produksi kelompok yang ada di komunitas anggota AMAN.

Gerai Nusantara akan mengadakan *AMAN Craft Expo* pada bulan September 2014 di Jakarta. Pameran ini berguna untuk mempromosikan produk kelompok usaha Komunitas dan kelompok usaha perempuan melalui Galeri Nusantara.

2.2. Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1. Sosial dan Pendidikan

Sekjen AMAN Telah menetapkan 5 Komunitas Masyarakat Adat yang perlu mendapatkan layanan khusus; Tobelo Dalam, Naulu, Punan, Orang Rimba, Talang Mamak

Salah satu yang telah ditindak lanjuti adalah Program *Community Center* di Komunitas Tobelo Dalam. Program ini menyediakan bangunan sebagai pusat informasi, dengan dukungan hibah dari *Seacology* dan mulai diimplementasikan pada bulan Oktober 2013.

Untuk bidang pendidikan secara umum kegiatan yang dilakukan masih berupa penyiapan konsep pengembangan Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN), mengembangkan rencana kerjasama dengan pihak pemerintah dan LSM serta peneliti untuk identifikasi, penguatan dan pengembangan bahasa-bahasa asli/ ibu termasuk di dalamnya untuk membuat kamus bahasa asli/ ibu. Saat ini AMAN telah menyelesaikan Draft Konsep Pendidikan Ala Masyarakat Adat dan dalam tahap pengembangan. Konsepnya disusun berdasarkan dua (2) kali Seri diskusi bertemakan Pendidikan Ala Masyarakat Adat atas kerjasama antara PB AMAN dan Sajogyo Institute. Konsep ini akan dikonsultasikan untuk mendapat masukan dari Pengurus dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam 3 bulan mendatang.

Untuk memastikan suksesnya program ini maka PB AMAN akan segera merekrut Staf untuk urusan Pendidikan



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

2.2.2. Kebudayaan

Untuk program di bidang kebudayaan, kegiatan yang sudah dilakukan adalah terus melakukan identifikasi wilayah-wilayah adat di Nusantara yang memiliki potensi pengembangan pariwisata, melakukan identifikasi agama leluhur yang dimiliki oleh masyarakat adat bersama bentuk-bentuk ritual.

Selain itu saat ini sedang mengembangkan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan program “Pengembangan Terpadu Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Keragaman Budaya untuk mewujudkan peradaban manusia Indonesia KREATIF, INOVATIF dan PRODUKTIF”. Program ini akan di fokuskan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui lokalatih pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat adat, penguatan festival-festival masyarakat adat tingkat wilayah dan daerah.

Untuk memastikan suksesnya program ini PB AMAN akan segera merekrut Staff Kebudayaan

2.3. Pelayanan dan Dukungan Komunitas

Pelayanan dan dukungan Komunitas meliputi 3 kelompok utama yaitu; Pemetaan Wilayah Adat, Tanggap Darurat dan Adaptasi Perubahan Iklim, Energi Terbarukan untuk Masyarakat Adat Nusantara.

Tujuan strategis:

Melaksanakan dan memastikan pelayanan dasar (peta dan tata ruang wilayah adat, energi, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kesehatan, pendidikan) yang cepat bagi masyarakat adat anggota AMAN dan yang bukan anggota AMAN tapi dengan syarat kondisinya paling minoritas, paling terpinggirkan dan terdiskriminasi serta memiliki akses rendah terhadap pelayanan dasar. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten, baik instansi pemerintah pusat, daerah maupun lembaga/ organisasi non-pemerintah serta kalangan dunia usaha.

Capaian-capaian strategis:

1. Terbangun komitmen dan kerjasama jangka panjang antara AMAN dengan berbagai instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi/ perusahaan yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberdayakan serta memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat adat. Kerjasama antara AMAN dengan minimal ada 5 lembaga terkait (Pemerintah, LSM dan Lembaga Donor)
2. Tersedia unit kerja pemberdayaan dan pelayanan masyarakat adat (UKP3, UKTD, unit kerja layanan kesehatan, UK-ENTER, dll.) Pada PB, PW dan PD AMAN yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan cepat dan efektif setiap saat kepada masyarakat adat yang membutuhkan: minimal terbentuk UKP3 di 20 PW dan 40 PD, semua UKP3 Wilayah mempunyai peralatan pendukung pemetaan partisipatif dan pengolahan data GIS, yaitu: minimal memiliki 4 unit GPS, 1 unit Kompas Sunto, 1 unit Komputer digitasi, 1



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

- unit Kamera pocket, 1 unit *voice recorder* ; minimal ada 10 Unit Pelayanan Komunitas (Tim Relawan Bencana) di PW/ PD
3. Tersedia kader-kader pemberdayaan dan pelayanan AMAN sesuai kebutuhan layanan dasar masyarakat adat. Ada 20 pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif dan perencanaan tata ruang untuk 20 Pengurus Wilayah AMAN serta 4 kali Pelatihan GIS untuk UKP3 Wilayah. Minimal ada 160 orang kader-kader AMAN yang memiliki kapasitas sebagai fasilitator pemetaan partisipatif dan perencanaan tata ruang. Minimal ada 40 orang kader-kader AMAN yang menguasai kapasitas sebagai ahli GIS dan Database
 4. Wilayah-wilayah adat anggota AMAN batas-batasnya terpetakan, memiliki rencana tata ruang yang punya daya mitigasi bencana dan rencana pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan serta terdaftar pada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Minimal ada 300 komunitas adat anggota AMAN dengan luasan sekitar 5 juta Ha wilayah adat yang terpetakan lengkap dengan perencanaan tata ruang serta diregistrasi dalam BRWA. Minimal ada 5 komunitas yang mempunyai strategi dan rencana aksi pengurangan risiko bencana di wilayah adatnya
 5. Tersedia sumberdaya dan logistik yang mencukupi seluruh anggota AMAN yang bisa digunakan setiap saat untuk memberikan pelayanan darurat pengurangan resiko dan penanggulangan bencana alam dan sosial bagi korban masyarakat adat. Adanya SOP dan perencanaan kontigensi tentang kebencanaan di PB AMAN dan minimal untuk 7 PW/ PD. Minimal ada 100 kader AMAN yang terlatih dalam pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat
 6. Tersedia sumberdaya khusus di AMAN untuk melakukan pelayanan terhadap komunitas masyarakat adat yang paling minoritas, paling terpinggirkan, terdiskriminasi dan memiliki akses rendah terhadap pelayanan dasar.
 7. Tersedia mekanisme kerja dan penggalangan dana internal antara unit-unit kerja pelayanan tinggakt PB, PW hingga PD AMAN
 8. Tersedia layanan listrik dan energi lainnya dari sumber-sumber energi terbarukan (ENTER NUSANTARA): Minimal ada 7 dokumentasi sumber-sumber Energi Terbarukan di Wilayah Adat. Modul pengembangan ENTER di Wilayah Adat, Minimal ada 7 komunitas yang terinstal listrik dari energi terbarukan. Minimal ada 7 pusat pelatihan Energi Terbarukan berbasis komunitas
 9. Ada dukungan untuk BRWA agar bekerja efektif dan terbentuk minimal 5 BRWA yang tersebar di seluruh Nusantara

Intervensi program PB AMAN sedang dan akan dilakukan melalui: (1) Pembentukan dan penguatan kapasitas unit-unit kerja (UKP3, Tim Tanggap Darurat) sesuai kebutuhan di PW dan PD AMAN, (2) Pendidikan kader, peningkatan kapasitas dan pendampingan unit-unit kerja pemberdayaan dan pelayanan di PW dan PD AMAN, (3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional, (4) Menyediakan informasi dan akses terhadap penggalangan dana dan bantuan teknis oleh PD AMAN dan komunitas adat dari berbagai pihak (pemerintah, LSM dan Lembaga Donor), dan (5) Pengembangan model sebagai pusat pelatihan Energi Terbarukan berbasis Masyarakat Adat



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

2.3.1. Pemetaan dan Registrasi Wilayah Adat

Saat ini AMAN telah memiliki 18 UKP3 Wilayah (Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Jambi, Sumut, Sulut, NTB, Maluku, Kalteng, Tano Batak, Maluku Utara, Jawa Bagian Barat, Riau, Nusa Bunga) dan 12 UKPP3 Daerah (Toraya, Gowa, Tanah Bumbu, Sumbawa, Sorong Raya, Banggai, Kamalisi, Kulawi, Pamona, Parimo, Tampo Bada, Tampo Lore).

Untuk program dan kegiatan pemetaan partisipatif dan registrasi wilayah adat, PB AMAN telah melakukan;

- 1) Ada 9 UKP3 Wilayah yang terbentuk sejak Maret 2013 setelah Rakernas Tumbang Malahoi yaitu di Kaltim, Sulut, NTB, Maluku, Kalteng, Tano Batak, Jawa Bagian Barat, Riau, dan Nusa Bunga. Sementara itu ada 3 UKP3 Daerah yang bertambah yaitu: Gowa, Sumbawa, Sorong Raya. Hal ini merupakan perkembangan yang menggembirakan dan untuk ke depan PB akan akan memusatkan konsentrasi untuk mendorong pembentukan UKP3 di tingkat Pengurus Daerah yang statusnya masuk dalam perwalian PB AMAN karena belum memiliki Pengurus Wilayah (Mentawai, TTS, Yapen Waropen), PW AMAN Bali dan PW AMAN Sumsel.
- 2) Sejak Desember 2012, PB AMAN memberikan dukungan pendanaan kepada masing-masing UKP3 Wilayah sebagai biaya operasional untuk memastikan UKP3 memberikan layanan pemetaan kepada anggota AMAN di wilayah masing-masing.
- 3) Training Fasilitator Pemetaan Partisipatif di tingkat wilayah; Sebanyak 17 kali di Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Jambi, Sumut, Sulut, NTB, Maluku, Kalteng, Tano Batak, Jawa Bagian Barat, Maluku Utara, Nusa Bunga. Jumlah kader Pemetaan Partisipatif dan Registrasi Wilayah Adat yang sudah dilatih sebanyak 326 orang.
- 4) Training GIS dan Data Base untuk 14 PW : Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Jambi, Sumut, Sulut, Tano Batak, Jawa Bagian Barat, Maluku, NTB. Jumlah kader yang sudah dilatih sebanyak 28 orang. Ada 4 PW dan PD dalam status perwalian PB AMAN akan mendapatkan training GIS paling lambat Desember 2013.
- 5) AMAN memberikan peralatan pendukung pemetaan partisipatif berupa GPS, Kompas, Komputer, Peta Dasar/ Citra, dan lain-lain kepada 18 UKP3 Wilayah yaitu Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Jambi, Sumut, Sulut, NTB, Maluku, Kalteng, Tano Batak, Maluku Utara, Jawa Bagian Barat, Riau, Nusa Bunga. PB AMAN saat ini sedang dalam proses distribusi peralatan pendukung pemetaan untuk 85 Pengurus Daerah.
- 6) Pasca lahirnya putusan MK35, AMAN memberikan dukungan pembuatan peta indikatif untuk 14 Wilayah: Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Jambi, Sumut, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Kalteng, Riau. Peta indikatif yang sudah diselesaikan adalah sekitar 1.200 komunitas Anggota AMAN.
- 7) AMAN juga telah menyerahkan Peta Wilayah Adat ke Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 324 komunitas dengan total luasan 2,643,261.09 Ha. Penyerahan peta ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara AMAN-KLH pada tahun 2010.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Saat ini Pengurus Wilayah terus aktif memfasilitasi anggota untuk melakukan pemetaan partisipatif. Total Pengajuan Pemetaan yang sudah disetujui untuk mendapat dukungan dari PB AMAN adalah 72 komunitas yaitu Sulsel (3), Tana Luwu (6), Sulteng (17), Kalsel (8), Sulut (1) Jambi (3), Sumut (12), Riau (15) dan, Kaltim (7). Pemetaan yang sudah menyelesaikan Peta Manual sudah ada 14 komunitas

Sebagai bagian dari tindak lanjut menyambut Putusan MK, telah dilakukan Sosialisasi dan Konsolidasi untuk 17 Wilayah: Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Jambi, Sumut, Sulut, NTB, Maluku, Tano Batak, Riau, Nusa Bunga, Kalteng, Jawa Bagian Barat. Konsolidasi ini penting untuk mendorong percepatan pemetaan dan registrasi wilayah adat sebagai bagian dari implementasi Putusan MK No 35.

AMAN menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Tentang Pemetaan Partisipatif bersama Tebtebba untuk sharing informasi mengenai perkembangan gerakan pemetaan partisipatif di berbagai negara dan sistem penunjang yang bisa dimanfaatkan dalam gerakan pemetaan partisipatif ini. Konferensi ini diikuti oleh 10 Pengurus Wilayah yang dinilai paling aktif melakukan pemetaan partisipatif.

AMAN berpartisipasi dalam Konferensi Internasional Pengamanan Hak Masyarakat adat Tanah dan Sumberdaya Alam di Interlaken, Swiss pada tanggal 19-20 September 2013. Pada acara ini AMAN menjadi penyelenggara Sesi tentang Pemetaan dan Dokumentasi. Model pemetaan partisipatif AMAN yang menekankan proses sosial budaya menjadi inspirasi bagi penggiat pemetaan partisipatif negara lain dari berbagai region, khususnya Afrika dan Amerika Latin. Hasil penting dari acara ini adalah kesepakatan untuk membuat peta global Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Persiapan pembuatan peta global ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2014.

2.3.2. Tanggap Darurat dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tanggap Darurat dan Adaptasi Perubahan iklim dilakukan bekerjasama dengan CORDAID dan AIPP. Hingga saat ini, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah:

AMAN telah memiliki SOP dan Perencanaan Kontinjensi tentang Kebencanaan. SOP ini telah disosialisasikan kepada semua pengurus AMAN melalui Milist dan RAKERNAS Tumbang Malahoi. SOP ini mewajibkan adanya kontribusi organisasi sebesar 5% dari total dana organisasi.

Saat ini sebanyak 30 Orang Pengurus dan Kader AMAN telah memiliki kapasitas untuk urusan Bantuan Tanggap Darurat. Peningkatan Kapasitas mereka dilakukan melalui training dan pertemuan intensif, diantaranya adalah:

- Mengikuti Workshop Kontinjensi Plan (Rencana Kontinjensi) melibatkan perwakilan Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan masing-masing 1 orang dan 2 perwakilan dari PB AMAN. Dilaksanakan di Jogja pada 20-24 Mei 2013 yang difasilitasi oleh CORDAID dan CRS. Saat ini dokumen CP yang dihasilkan baru 2 Wilayah yaitu Maluku Utara untuk gunung Gamalama dan di Sumatera Utara untuk Banjir.
- Pelatihan Kebencanaan untuk Wilayah Maluku Utara dan Sumatera Utara



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

(Maluku Utara di Ternate 14-17 Mei 2013 dan Sumatera Utara di Medan pada 11-14 Juni 2013). Pelatihan ini diikuti oleh masing-masing 15 perwakilan dari komunitas. Hingga saat ini ada 30 kader dari 2 wilayah yang sudah dilatih kebencanaan.

- Mengikuti *Learning Event* mitra CORDAID dan CRS di Jogja, pada 02-05 Juli 2013
- Mengikuti diskusi perancangan RPBD (Rancangan Pengurangan Risiko Bencana) Kab. Bogor pada 10 September 2013
- Mengikuti pelatihan Pengambilan Data di lokasi bencana, di Balerante-Jogjakarta pada 23-25 September 2013. Pelatihan pengambilan data ini diikuti oleh Annas dari PB AMAN dan Ahmad Fadhila (Icay) dari BPAN.

AMAN terus aktif melakukan sosialisasi internal dan dengan pihak lain termasuk pihak pemerintah untuk memastikan adanya sebuah pemahaman dan membuat sebuah *strategy* masyarakat adat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, untuk itu beberapa kegiatan yang dilakukan adalah:

- Regional Joint Reflection Workshop for Adaptation Partner di Chiangmai pada 26-28 Maret 2013. Kegiatan ini diikuti oleh Munadi Kilkoda (PW AMAN Malut) dan Annas (PB AMAN).
- Hearing dengan SKPD (BPBD, Dinkes, Dinhut, Dinsos) Halmahera Utara terkait konsep adaptasi perubahan iklim di Komunitas Pagu dan Gura, di Tobelo pada Mei 2013.
- Memfasilitasi kunjungan Staff AIPP terkait Adaptasi Perubahan Iklim di Maluku Utara pada 30 Agustus - 1 September 2013. Kunjungan ini dalam rangka persiapan untuk studi banding 5 Negara partner AIPP (Thailand, Philipina, Laos, Malaysia, dan Indonesia) yang rencananya akan dilaksanakan di Halmahera Utara tahun depan

Salah satu hal yang menjadi kebutuhan masyarakat adat adalah adanya informasi mengenai model-model kearifan masyarakat adat dalam merespon perubahan iklim. Untuk itu memfasilitasi Pendokumentasian kearifan lokal terkait Adaptasi Perubahan Iklim di Komunitas Pagu dan Gura, pada Mei - Juni 2013.

AMAN juga aktif dalam menggalang dukungan untuk tanggap darurat komunitas anggota yang mengalami bencana, dukungan ini telah diberikan kepada:

- Bencana kelaparan di Tambraw pada April 2013 sebesar 7,3 juta rupiah
- Bencana Gempa Bumi di Lombok pada 22 Juni 2013 sebesar 5 juta rupiah
- Mengirimkan bantuan bencana Banjir di Meratus pada Juni 2013 sebesar 5 Juta rupiah

Untuk saat ini PB AMAN sedang mempersiapkan Studi Banding 5 Negara untuk Adaptasi Perubahan Iklim yang akan dilakukan di Maluku Utara dan mengembangkan sebuah Sistem Disaster Management Plan untuk komunitas adat

2.3.3. Energy Terbarukan Nusantara (ENTER-NUSANTARA)

Dalam rangkaian Kampanye “Energi Bersih untuk Borobudur” yang diselenggarakan pada tanggal 13 s/d 28 Oktober 2012, Sekjen AMAN dan Direktur Eksekutif *Greenpeace* Asia Tenggara menandatangani kerja sama untuk mendorong



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

pemanfaatan energi terbarukan di wilayah masyarakat adat di seluruh Nusantara. Program ini bertujuan untuk memberikan penerangan bagi masyarakat-masyarakat adat kawasan terpencil. Juga mendesak pemerintah untuk memastikan keadilan energi, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan.

Inisiatif ini kemudian diberi nama ENTER NUSANTARA dan hingga saat ini kegiatan telah dilakukan diantaranya :

- Mengembangkan sebuah Kerangka Strategi untuk ENTER-Nusantara yang saat ini sudah dalam tahap finalisasi oleh PB AMAN dan *Greenpeace*.
- 5 Komunitas yang terseleksi untuk peningkatan kapasitas dalam Pengembangan Energi Terbarukan (ENTER) ini yang kemudian dilanjutkan dengan Survey Potensi Energy Terbarukan di Komunitas Adat Bankagi, Togian, Sulawesi Tengah dan pembuatan video proposal ENTER Nusantara pada Mei 2013.
- Membangun kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Jepang untuk pengembangan energi terbarukan di Komunitas Tumbang Malahoi (Pembuatan proposal untuk instalasi mikrohidro di Tumbang Malahoi). Proposal masih dalam masa perbaikan.
- Membangun kerjasama dengan UNDP untuk program Biochart di 5 Komunitas Adat (membuat proposal pengembangan Biochart yang diajukan ke Finlandia). Proposal sudah terkirim ke Kedutaan Finlandia dan menunggu hasil verifikasi.
- Mengadakan Workshop untuk Calon Donor ENTER Nusantara (Donor Meeting) di Hotel Orio, Jakarta pada 16 September 2013. Dalam workshop ini hadir 2 lembaga yang siap untuk membantu ENTER yaitu dari STIREC (lembaga penelitian energi terbarukan) dan GIZ. Bentuk bantuan belum dituangkan dalam MoU

Untuk enam bulan ke depan PB AMAN melalui tim ENTER-NUSANTARA akan terus menggalang dukungan pengembangan energy terbarukan untuk anggota AMAN dan menindaklanjuti proposal yang sudah dikirim ke lembaga donor serta mempersiapkan implementasi di Tumbang Malahoi



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

BAGIAN III

Penguatan Organisasi

3.1. Organisasi , Kaderisasi dan Keanggotaan

Tujuan Strategis

Menghadirkan keanggotaan dan kepengurusan AMAN dan organisasi-organisasi sayapnya paling sedikit di 30 provinsi dan di 50% dari jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan sosok dan karakter organisasi kemasyarakatan independen yang tanggap membela, aktif melindungi dan cepat melayani dengan mengelola dengan cermat beragam isu perubahan kebijakan nasional (mis. Putusan MK 35, RUU PPHMA, RUU Desa, RUU Pertanahan) yang terintegrasi dengan aksi-aksi kolektif yang nyata di tengah masyarakat adat (mis. Gerakan Rehabilitasi Wilayah Adat, Gerakan Energi Terbarukan, Petisi MK 35, Gerakan Plangisasi dan Pemetaan Wilayah Adat, Gerai Nusantara, dan sebagainya).

Capaian Strategis

1. Ada 20 PW dan 83 PD memiliki legalitas yang sah membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah, kepengurusan yang lengkap, Rumah AMAN sebagai pusat kegiatan, program yang jelas dan manajemen organisasi dan proyek yang baik dan akuntabel.
2. Ada paling sedikit 10 PW dan 120 PD baru terbentuk yang mampu menyelenggarakan organisasi sesuai dengan syarat minimum sesuai ketentuan AD/ ART AMAN.
3. Tersedia sistem dan program tetap pengkaderan berjenjang dan peningkatan kapasitas tematik bagi pengurus, kader AMAN dan organisasi-organisasi sayap yang bernaung di bawah AMAN
4. Tersedia sistem pertukaran informasi dan komunikasi yang efektif antara PB , PW, PD AMAN, organisasi-organisasi sayap, badan-badan otonom dan badan-badan usaha AMAN (SOP dan protokol komunikasi).
5. Terselenggarakannya rapat-rapat pengambilan keputusan organisasi dan perencanaan program kerja yang terpadu dan sinergis di semua tingkatan sesuai AD/ ART.
6. Tersedianya sumber-sumber pendanaan yang makin beragam, terutama sumbernya dari iuran dan sumbangan Masyarakat adat serta hasil usaha sendiri, melalui badan-badan usaha yang didirikan oleh organisasi untuk tujuan pendanaan mandiri.

Intervensi program ini akan dilakukan melalui: (1) Pengelolaan database kader AMAN, pendidikan kader dan kaderisasi berjenjang beserta monitoring dan evaluasi kinerja untuk kader pemimpin. (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja seluruh perangkat organisasi di tingkat PW AMAN, organisasi-organisasi sayap dan badan-badan otonom di tingkat nasional, (3) pendampingan terukur pengembangan organisasi. (4) Penggalangan dukungan program/ proyek dalam lingkup PB AMAN dan mitra pendukung AMAN untuk mendukung kelengkapan administrasi dan pengelolaan organisasi di wilayah dan daerah, dan (5) Memprakarsai, memfasilitasi



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

serta memastikan penyelenggaraan Muswil AMAN di wilayah-wilayah yang belum ada PW AMAN.

Hingga saat ini PB AMAN terus memobilisasi dukungan dan pengawalan untuk penyelenggaraan organisasi pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Komunitas. Hasil pertemuan evaluasi terhadap Pengurus Wilayah ada 18 Pengurus Wilayah yang memiliki struktur dan mekanisme kerja untuk melaksanakan kerja-kerja organisasi, sedangkan 2 Pengurus Wilayah tidak aktif (PW AMAN Sumatera Selatan dan PW AMAN Bali). Pasca Rakernas III, PD AMAN bertambah 5 sehingga total PD AMAN sebanyak 87 yang kondisi struktur organisasi keseluruhannya masih belum maksimal karena minimnya personil yang membantu kerja2 BPH AMAN Daerah.

Situasi PW AMAN Sumsel dan PW AMAN Bali

- PW AMAN Sumsel dan PW AMAN Bali saat ini mengalami kevakuman sehingga sulit mendapatkan informasi dan memastikan layanan kepada anggota yang berada dibawah dua PW ini.
- Dalam pertemuan Konsolidasi Saung Dolken, pada bulan Desember 2012, semua pengurus wilayah diberikan kesempatan untuk segera melengkapi struktur kerja organisasi di masing-masing Pengurus Wilayah. Namun demikian, pada Konsolidasi Hotel Akmani tanggal 19-21 Agustus 2013, kedua Pengurus Wilayah ini tidak memperlihatkan kemajuan.
- Untuk itu, RPB ini sebaiknya memutuskan tindakan organisasi yang harus diambil terhadap kedua PW.

3.1.1. Sistem Administrasi Pengurus Wilayah dan Daerah

Sampai saat ini organisasi telah memiliki daftar pengurusan SKT sebagai syarat organisasi dalam melakukan pendaftaran pada Kementerian Dalam Negeri. Adapun SKT yang telah diurus dan masuk ke arsip PB AMAN yakni 5 PW dan 9 PD, namun untuk memenuhi syarat ini wajib memiliki 17 SKT di Wilayah dan Daerah. Untuk Menjalankan sistem kordinasi dan komunikasi antar pengurus telah di buat SOP khusus terkait dengan kordinasi urusan organisasi dan program.

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keuangan, AMAN melakukan training Managemen dan keuangan yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali untuk 18 Pengurus Wilayah. Training ini diberikan kepada staf keuangan dari Pengurus Wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tana Luwu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Bunga, Maluku, Sulut, Riau, Tano Batak, Maluku Utara, Jawa Bagian Barat.

3.1.2. Dukungan Terhadap Dewan AMAN Nasional

Pengurus Besar memberikan dana komunikasi kepada DAMANNAS sebesar 2 juta Rupiah/ bulan/ anggota DAMANNAS². Disamping itu, dukungan biaya perjalanan juga

²Sampai saat ini Ketua DAMANNAS tidak menerima Biaya Komunikasi dan Biaya Perjalanan



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

diberikan kepada DAMANNAS untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk periode Februari- September 2013 dana biaya komunikasi bulanan yang sudah diberikan sebesar Rp. 218,500,000 dan biaya perjalanan sebesar Rp. 51,906,350.

3.1.3. Dukungan Terhadap Pengurus Wilayah

Dalam memaksimalkan kerja-kerja organisasi terutama memperkuat komunikasi dan kordinasi terhadap seluruh personil pengurus wilayah telah dilakukan beberapa hal diantaranya :

Memberikan dukungan terhadap pengadaan sekretariat Pengurus Wilayah kepada 4 PW dan 2 PD; diantaranya PW Tanah Luwu, PW Sulawesi Selatan, PW Maluku Utara, PW Tano Batak, PD Gowa dan PD Yapen Waropen.

Sampai RPB XII, Pengurus Besar telah mendukung dan mendistribusikan atribut, peralatan dan kelengkapan kerja organisasi kepada 18 Pengurus Wilayah berupa Bendera AMAN, Modul Kader AMAN, Komputer Keuangan. Dukungan peralatan pemetaan partisipatif juga diberikan kepada 18 Pengurus Wilayah (*lihat selengkapnya di Bagian II*)

Dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2013, organisasi di tingkat wilayah telah melakukan restrukturisasi kepengurusan melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (MUSWIL) sebagai pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah; yang mana masa kepengurusan Pengurus Wilayah tersebut berakhir pada tahun 2013 ini. Adapun Pengurus Wilayah yang melaksanakan Muswil dengan dukungan PB AMAN adalah 1) PW Jawa Bagian Barat, 2) PW Sulawesi Utara, 3) PW Maluku Utara, 4) PW Sulawesi Tengah, dan 5) PW Sulawesi Selatan.

Dukungan kepada Pengurus Wilayah untuk melakukan Muswil: Maluku Utara (21-23 Mei 2013), Sulawesi Tengah (15-17 Mei 2013) dan, Sulawesi Selatan (26-29 Juni 2013). Saat ini, PB AMAN sedang mengawal proses Muswil untuk PW Sumatera Selatan, PW AMAN Bali dan PW AMAN Kalimantan Barat.

Dalam kurun waktu Februari sampai Oktober 2013, dukungan organisasi terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) untuk tingkat Pengurus Wilayah telah dilakukan di 2 Pengurus Wilayah, yakni PW Nusa Tenggara Barat (9-11 April 2013) dan PW Kalimantan Tengah (30 Agustus 2013)

3.1.4. Dukungan Terhadap Pengurus Daerah

Di tingkat Daerah, struktur organisasi telah mengalami penambahan sebanyak 5 Pengurus Daerah antara lain; 1) PD Humbang Hasundutan, 2) PD Kutai Barat, 3) PD Tampotika, 4) PD Kaur dan 5) PD Orang Rimba Bukit Dua Belas. Selanjutnya, dukungan organisasi terhadap pelaksanaan Musda juga dilakukan terhadap PD yang telah berakhir masa kepengurusannya, diantaranya: 1) PD Medan, 2) PD Sanggau, 3) PD Paer Daya (KLU), dan 4) PD Seram Bagian Barat.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Pelaksanaan Musda telah dilakukan di: Kutai Barat (18-19 April 2013), Tampotika (29-30 April 2013), Humbang Hasundutan (25 Mei 2013), Kaur (26 Juni 2013), Orang Rimba Bukit12 (27-29 Juni 2013), PD Medan, PD Sanggau, PD Paer Daya (KLU) dan PD Seram Bagian Barat

Pada tingkat Pengurus Daerah, dukungan organisasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dilakukan untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Adapun PD yang mendapat dukungan organisasi dalam pelaksanaan Rakerda berjumlah 2, yakni PD Saka Mese Nusa dan PD Sumbawa.

3.1.5. Komunitas Anggota AMAN

Dalam perjalanannya, keanggotaan AMAN terus mengalami peningkatan. Dalam 3 kegiatan besar organisasi dari KMAN, Rakernas dan RPB, pengesahan anggota AMAN sangat signifikan, yang paling banyak pada kegiatan Rakernas dan KMAN. Saat ini keanggotaan AMAN per Oktober 2013 telah berjumlah sebanyak 2240 komunitas pasca Rakernas III di Tumbang Malahoi. Pada saat Rakernas III terjadi penambahan sebanyak 240 komunitas, dari jumlah sebelumnya sebanyak 2000 komunitas.

Dari jumlah komunitas anggota AMAN ini yang dilakukan secara rutin adalah mengirimkan informasi tentang perkembangan AMAN melalui Gaung AMAN yang dikirimkan per dua bulan. Selain lewat Gaung AMAN juga dibangun radio komunitas (rakom) terhadap komunitas yang memastikan penyebaran informasi baik untuk komunitas maupun publik. Adapun dukungan pembangunan rakom ini dilakukan pada 6 komunitas anggota AMAN yakni di Enggano, Secanggang, Togean, Dayak Meratus, Cek Bocek dan Toraja.

Kemudian pelaksanaan pertemuan komunitas yang didukung oleh organisasi untuk pelaksanaan pertemuan komunitas seperti Talang Mamak (Indragiri Hulu - Riau), Libu Bohe (Sulteng), Konsolidasi Komunitas untuk pembentukan PD Fak-fak, Konsolidasi Komunitas untuk pembentukan PD Bintuni, Konsolidasi Komunitas untuk pembentukan PD Raja Ampat. Kemudian memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aksi yang dilakukan oleh komunitas Dayak meratus di Kalimantan selatan.

Untuk pengutipan iuran anggota, upaya yang telah dilakukan adalah mengirimkan surat edaran yang dicantumkan melalui Gaung AMAN. Namun sampai saat ini pembayaran iuran anggota masih belum optimal terjadi.

Penambahan anggota baru yang diusulkan sebanyak 12 komunitas, namun yang memenuhi syarat secara verifikasi dan administrasi (pengembalian formulir calon anggota) sebanyak 2 komunitas untuk disahkan di RPB XII.

3.1.6. Kader AMAN

PB AMAN hingga saat ini terus aktif mengidentifikasi kader-kader Pemula, Penggerak dan Pemimpin dari masyarakat adat. Hal ini dilakukan secara langsung maupun melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Saat ini PB AMAN telah



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

mempunyai Rancangan Pendidikan Kader dan sedang mengembangkan sebuah kerja sama dengan Sayogyo Institute (SAIN) untuk pelaksanaan Pendidikan Kader secara terstruktur pada masa yang akan datang.

Pada Rakernas III lalu jumlah kader penggerak yang telah dilatih sebanyak 156 orang. Kemudian pasca Rakernas III sampai RPB XII jumlah kader penggerak berjumlah menjadi 1109 orang (dengan total penambahan sebanyak 953 orang), yang telah dilatih berbagai jenis pelatihan yang diberikan kepada kader. Terkait kader pemimpin (kader politik) yang telah terdata oleh Pengurus Wilayah dan Daerah sebanyak 181 orang yang akan mengikuti Pemilu 2014 sebagai Calon Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten).

Untuk meningkatkan kapasitas kader-kader AMAN maka serangkaian training telah dilakukan:

- Peningkatan Kapasitas bagi kader Penggerak untuk 15 Pengurus Wilayah; Sulsel, Tana Luwu, Sulteng, Kaltim, Bengkulu, Kalbar, Sumut, Jambi, Kalimantan Selatan, Bengkulu, NTB, Jabagbar, Nusa Bunga, Sulut dan Maluku Utara dengan total kader sebanyak 329 orang.
- Pendidikan Pemetaan Partisipatif bagi kader masyarakat adat (total kader 326 orang), GIS dan Database (total kader 28 orang). *lihat laporan selengkapnya di Bagian II*
- Pendidikan Investigasi bagi kader AMAN dengan total peserta sebanyak 51 orang. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 region besar, yakni region Barat meliputi Sumatera dan Jawa, region Tengah meliputi Kalimantan dan Sulawesi, serta region Timur meliputi Bali-Nusra, Papua dan Kepulauan Maluku).
- Pelatihan Fasilitator Usaha untuk Masyarakat Adat dengan total kader sebanyak 15 orang.
- Pendidikan Kebijakan dan Undang-Undang tingkat nasional, bertempat di Sayogyo Institute-Bogor dihadiri oleh 12 kader AMAN.
- Pendidikan Jurnalisme dilakukan sebanyak 4 kali, yakni 1 kali di tingkat nasional dan 3 kali ditingkat wilayah dengan total peserta sebanyak 68 orang.
- Pendidikan advokasi berbasis jurnalisme dilakukan sebanyak 1 kali di tingkat nasional dan wilayah yang bertempat di Djogja dengan total peserta sebanyak 17 orang.
- Pendidikan *Public Speaking* dilakukan sebanyak 2 kali dengan total peserta sebanyak 39 orang yang berasal dari kader AMAN, Ketua BPH Wilayah, Organisasi sayap BPAN dan PEREMPUAN AMAN.
- Pendidikan kebencanaan bagi masyarakat adat sebanyak 2 kali di tingkat wilayah dengan total peserta sebanyak 28 orang.
- Saat ini ada 6 orang kader yang sudah mengikuti program magang di PB AMAN (Tano Pakpak, Tana Luwu, Bengkulu, Tano Batak, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat).

3.1.7. Peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia

Peringatan hari masyarakat adat se-dunia dilaksanakan tepat pada tanggal 09 Agustus 2013 di tingkat nasional dengan mengundang duta negara-negara yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat, pemerintah dan jaringan pendukung AMAN.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

3.2. Informasi Dan Komunikasi

Tujuan strategis

Mengarus-utamakan isu-isu masyarakat adat Nusantara di dalam dan di luar negeri melalui pengembangan media komunitas, jurnalisme warga dan media sosial terkoneksi baik dengan media massa nasional dan global dengan cara mengembangkan kapasitas PW, PD dan kader-kader AMAN di tingkat komunitas adat sebagai sumber konten berita dan cerita.

Capaian-capaian strategis

1. Terbangunnya sistem informasi yang mengalir bebas (*free flow*) dari dan untuk komunitas adat dengan menggunakan konsep jurnalisme warga
2. Terbangunnya komitmen dan kerjasama saling mendukung antara AMAN dengan berbagai media massa tematik (mis. VHR) dan media massa umum di daerah (mis. Ruai TV, RRI Ternate), nasional (mis. Sinar Harapan) dan internasional
3. Adanya sistem pelayanan data dan media informasi organisasi AMAN yang murah, cepat, updated secara berkala dan efektif dari PB AMAN kepada seluruh pengurus, kader AMAN, komunitas anggota dan para pendukung serta publik luas melalui website AMAN, publikasi buku, Gaung AMAN, Rakom, TV, radio streaming, SMS Adat dan media sosial
4. Tersedianya tim jurnalis warga minimal pada 25 PW dan 82 PD yang terlatih dan mampu memproduksi berita serta cerita dengan menggunakan salah satu atau lebih dari keterampilan pengoperasian: hand-phone (sms), tulisan/ teks, audio dan video
5. Ada satu Sistem Informasi Masyarakat Adat (SIMA) yang berbasis portal yang ditopang dengan Adat SMS
6. Ada News Room AMAN yang menjamin tersedianya berita-berita (konten) tentang masyarakat adat dan gerakan AMAN melalui www.gaung.aman.or.id dengan kontributor dari pengurus, kader, anggota, organisasi sayap dan pihak terkait lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Intervensi program PB AMAN dalam pengembangan INFOKOM ini akan dilakukan melalui: (1) Mengembangkan dan mengelola database yang lengkap tentang masyarakat adat dan AMAN serta mudah diakses. (2) Lokalatih jurnalis warga. (3) Penyediaan modul training dan standard penggunaan SMS frontline sebagai model komunikasi untuk berbagi informasi. (4) Mengelola media internal AMAN secara terintegrasi, yaitu: News Room, Website, Gaung AMAN, Radio Streaming, AdatSMS, media sosial facebook dan twitter, jaringan radio komunitas dan TV streaming, (5) Membangun kontak, memperkuat komitmen dan dukungan dari para pemimpin redaksi dan wartawan senior media cetak dan elektronik nasional, (6) Diskusi reguler bulanan dengan para jurnalis media cetak dan elektronik untuk isu-isu masyarakat adat, (7) Memproduksi dan menyebarkan fact-sheets (lembar fakta), press release (rilis media), poster, video singkat tentang isu-isu masyarakat adat secara reguler di media mainstream (media umum), website, social media, (8)



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Melakukan kerjasama dengan media cetak, media on air untuk penyebaran informasi dan talk show atau berita khusus terkait isu masyarakat adat, (9) Membuat layanan iklan gerakan masyarakat adat melalui media on air mainstream, (10) Memfasilitasi kunjungan media ke titik-titik panas di komunitas-komunitas anggota AMAN

Perkembangan pasca Rakernas III telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap perjalanan pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagai wajah dan senjata mempublikasikan berbagai kerja-kerja yang telah dilakukan oleh AMAN. Hal yang paling mendasar yang terjadi sampai saat ini adalah Infokom AMAN belum memiliki Direktur yang bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan program yang telah disusun. Direktur Infokom awalnya telah ditunjuk saudara Ade Tanesia namun karena tidak dapat berdomisili di Jakarta atau harus berada di Jogja kemudian beliau diputuskan tidak jadi menjabat Dir. Infokom AMAN. Kemudian PB AMAN mencari direktur infokom yang baru yaitu menetapkan saudara Anggit Saranta, namun hanya bertahan 3 bulan dan kemudian beliau mengundurkan diri oleh urusan keluarga dan berencana pindah domisili di luar Jakarta. Dengan situasi ini maka diangkatlah saudara Mona Sihombing sebagai PJS Dir. Infokom selama 3 bulan dan saat ini sedang dilakukan proses rekrutmen untuk Dir. Infokom yang baru dengan jumlah 11 pelamar dan dalam waktu dekat akan dilakukan proses seleksi dan rekrutmen.

Untuk perkembangan program Infokom yang telah dilakukan antara lain :

3.2.1. Perbaikan Infokom AMAN

Untuk memperbaiki infokom AMAN, dilakukan Kegiatan assesmen yang bekerjasama dengan lembaga perspektif baru untuk menghasilkan rekomendasi terhadap kinerja dari Infokom AMAN. Dari hasil yang berupa rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh AMAN antara lain saat ini AMAN memiliki seorang staf yang bertugas untuk membangun jaringan dan relasi dengan jurnalis media mainstream. AMAN bekerjasama dengan Intermatrix juga telah melatih pengurus inti (18 ketua BPH + 3 Deputi) dan Organisasi sayap (Perempuan AMAN dan BPAN nasional dan wilayah) untuk menjadi juru bicara kunci terkait dengan hak-hak masyarakat adat terutama pasca keluarnya Putusan MK 35.

3.2.2. Perkembangan Media

Penyebaran informasi secara internal terus mengalami perbaikan guna memastikan informasi yang terjadi di tengah masyarakat adat dan organisasi secara cepat diketahui baik secara internal maupun eksternal. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain :

- Media Cetak AMAN dilakukan perubahan atas tampilan Gaung AMAN dari bulletin menjadi model majalah, kemudian berita yang dimuat adalah berita yang bersumber dari jurnalis atau infokom AMAN Wilayah, jumlah cetakan juga meningkat dari 1500 exemplar menjadi 2500 exemplar per dua bulan yang didistribusikan ke PW, PD , Komunitas dan Jaringan Kerja AMAN.
- Selain Gaung AMAN, media Cetak yang diterbitkan adalah berupa kalender, Buku Hasil KMAN IV, Buku Saku, poster Putusan MK dan Beberapa buku lainnya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan kearifan masyarakat adat



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

yang jumlah cetakan disesuaikan dengan jumlah anggota, Pengurus dan jaringan AMAN yang akan menerima pendistribusian. Untuk memastikan berita dari komunitas aktif dikirim, maka dilakukan pelatihan untuk biro infokom 11 wilayah dan jurnalis warga komunitas masyarakat adat yang dilakukan di 3 wilayah.

Salah satu misi utama AMAN adalah mengurus-utamakan isu-isu Masyarakat Adat ke media dan publik untuk mendapatkan dukungan media dan publik terhadap situasi yang dihadapi masyarakat adat. Untuk itu, perkembangan yang dapat diukur dari media online adalah sebagai berikut:

- Media Online AMAN juga dilakukan perbaikan terutama Website aman.or.id yang direkonstruksi sehingga menjadi lebih mudah dan menarik untuk dikunjungi. Berdasarkan data analisis bahwa media online AMAN memperoleh ranking dunia: dari 3,824,530 (sebelum rakernas) meningkat menjadi 1,201,347 (setelah rakernas) sedangkan ranking nasional: dari 79,910 (sebelum rakernas) meningkat menjadi 27,984 (setelah rakernas).
- Pengunjung website AMAN dari 9 Kota besar di Indonesia : Jakarta, Depok, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Bogor, Surabaya, Samarinda dan
- 9 Negara yang menjadi pengunjung terbanyak yaitu: Indonesia, United States, Australia, Netherland, Germany, Malaysia, United Kingdom, Singapore dan Thailand. Informasi analisis ini dari alexa.com yang di dapatkan dari Google analytics.
- Untuk sosial media seperti Twitter aman memiliki follower 1990, sedangkan untuk facebook memiliki anggota 2.017.

Selain media cetak dan online, dikembangkan media alternative lainnya yaitu SMS Adat yang saat ini memiliki nomor yang aktif mencapai 1.403. Radio Gaung AMAN dan Radio Komunitas yang telah dibangun ada di 6 komunitas anggota AMAN. Untuk memastikan keaktifan radio komunitas yang dibangun maka telah dilakukan peningkatan kapasitas untuk para penyiar, mendukung perawatan alat dan pembangunan studio. Radio komunitas yang dibangun mendapatkan perhatian yang cukup luas sehingga 6 negara asia melakukan kunjungan belajar ke salah satu radio komunitas anggota AMAN yaitu Komunitas Cecanggang.

Selain memperkuat informasi melalui media internal, juga dilakukan kerjasama dengan media eksternal baik yang dilakukan secara mengikat maupun yang tidak. Media cetak secara nasional yang intensif dibangun kerjasamanya antara lain Citra Nusantara (1500 – 3000 exemplar / minggu) , Sinar Harapan (500 exemplar per minggu), Tempo, Jakarta post, Kompas, Tribun news, Antara news. Sedangkan media elektronik adalah dengan Metro TV.

Untuk menggalang dukungan lebih luas dan meningkatkan sisem penyebaran informasi masyarakat adat, AMAN kemudian membuat kompetisi yaitu Adat Award untuk kategori video, Tulisan dan Radio.

AMAN juga terus aktif membangun sistem pelayanan data dan informasi organisasi AMAN kepada pengurus, komunitas anggota dan publik luas. Pembangunan sistem database AMAN cukup memakan waktu yang lama, terutama dalam merumuskan model database yang akan dibangun dan bagaimana mengoperasionalkannya secara terstruktur dan sistematis. Sistem Database yang disiapkan adalah Pusat Data



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Masyarakat Adat yang saat ini masih dikonstruksi secara nasional yang kemudian ke depannya akan dibangun PDMA pada tingkat wilayah dan daerah.

Beberapa hal yang telah dilakukan terkait dengan pembangunan Database adalah :

- Terbangunnya Server Database GIS
- Terbangunnya Aplikasi WebGIS
- Database Spasial Masyarakat Adat
- Database spasial Pengurus MA
- Beberapa hasil analisis spasial lanjutan terkait wilayah adat dapat dilakukan mandiri
- Data data dari PW dapat dimasukkan dalam sistem database
- Data sebaran dan alamat pengurus dapat ditampilkan dalam bentuk Peta
- Data sebaran Indikatif MA dapat ditampilkan dalam bentuk peta

3.3. Operasional, Manajemen dan Penggalangan Sumberdaya

Tujuan Strategis:

1. Menciptakan system manajemen keuangan yang profesional , memenuhi standarisasi audit dan terkoneksi di semua level PB, PW dan PD
2. Mewujudkan transparansi aliran keuangan organisasi yang dapat di akses dan di ketahui oleh pengurus, anggota dan public
3. Menciptakan manajemen administrasi organisasi yang rapih dan terintegrasi
4. Memberikan bantuan pelayanan manajemen keuangan dan administrasi bagi PW, PD dan Organisasi sayap
5. Menciptakan suasana nyaman dan produktif bagi Staff Rumah AMAN

Capaian Strategis

1. Publikasi dan Distribusi minimal 150 exemplar SOP Keuangan ke PW dan PD (2013)
2. Tersedia Modul Pelatihan Keuangan untuk Organisasi (2013)
3. Minimal 40 staf keuangan PD mendapatkan Training Manajemen Keuangan Organisasi (2013)
4. Minimal 30 kader AMAN menyelesaikan Magang Keuangan di PB AMAN
5. Standarisasi system pelaporan keuangan di PB, PW, PD dan organisasi sayap pada tahun 2014
6. Adanya Laporan Bulanan Keuangan PB dan PW sesuai standar pelaporan yang ditetapkan dengan menggunakan System Keuangan Accurate (2014).
7. Adanya Laporan Audit Keuangan organisasi pertahun PB AMAN (2012-2016)
8. Laporan Audit Tahunan PW AMAN (2013 - 2017)
9. Publikasi Laporan Keuangan AMAN setiap 2 bulan melalui website www.aman.or.id dan Gaung AMAN (2013 - 2017)
10. Adanya database dokumen-dokumen Proyek dan Organisasi yang rapi dan terintegrasi (2014)

Strategi Intervensi untuk pengembangan Operasional dan Manajemen AMAN dilakukan melalui: (1) Melakukan Training Pengelolaan Keuangan untuk peningkatan kapasitas seluruh staf keuangan PB, PW dan Organisasi sayap, (2) Mencetak dan Mendistribusikan SOP dan Modul Keuangan, (3) Workshop Standar Operasional Prosedur Keuangan AMAN utk seluruh PB , PW dan Organisasi sayap, (4)



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Menyediakan layanan magang keuangan untuk staff keuangan PW dan PD, (5) Menyediakan Asistensi terkait Standar Operasional Prosedur Keuangan AMAN ke PW dan Organisasi sayap, (6) Mempublikasikan laporan aliran keuangan organisasi melalui Website www.aman.or.id dan Gaung AMAN, (7) Mengembangkan sebuah System Database dan Dokumentasi yang terintegrasi dan; (8) Menyelenggarakan Audit Keuangan Organisasi tahunan.

Saat ini sistem keuangan PB AMAN terus melakukan pembenahan dan lebih sistematis. Untuk memastikan kelancaran sistem keuangan Dir. OM dan PSDM pada bulan Mei telah merekrut 1 orang Kepala Keuangan dan 1 orang Sekretaris untuk memastikan pekerjaan operasional dan manajemen dapat teratasi dengan baik. Pekerjaan yang semakin bertambah serta kebutuhan penyelesaian laporan yang berbeda formatnya dari beberapa donor sehingga manajemen keuangan harus memastikan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Perbaikan Sistem manajemen keuangan disesuaikan dengan kondisi organisasi yang semakin berkembang dan terkoneksi laporan keuangan antara PB dengan di PW.

Oleh karena itu saat ini sistem keuangan PB AMAN sudah mulai menggunakan *software* keuangan *Accurate*, ada 2 staf yang telah mendapatkan training keuangan system accurate ini. Untuk software, data yang sudah dilakukan entri data mulai tahun 2013, namun ini masih terkendala oleh beberapa item masih belum balance dan terkonsolidasi dari data-data proyek-proyek. Sistem keuangan menggunakan software akurat juga diberlakukan untuk 18 pengurus wilayah dimana staff keuangan masing-masing wilayah telah mengikuti 2 kali pelatihan cara mengoperasionalkan sistem ini.

Pada tanggal 5 September 2013 di Rumah AMAN Sempur, Bogor, Tim Administrasi JSDF melakukan review aspek manajemen keuangan Program SiCOLife oleh pelaksana (AMAN). Admin JSDF secara keseluruhan memberikan penilaian "MEMUASKAN". Laporan Admin JSDF secara khusus menyebutkan bahwa Aturan Manajemen dan Mekanisme Kontrol di AMAN sudah bagus serta pelaporan bulanan kepada Admin JSDF oleh Unit Pelaksana Proyek selalu tepat waktu. Penilaian memuaskan ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan kepada organisasi masyarakat adat seperti AMAN yang mampu mengimplementasikan sebuah Proyek besar secara profesional.

Saat ini posisi keuangan di PB AMAN hingga oktober ini sebagai berikut: Dana kita terima sebesar Rp. 18.283.636.000 dan jumlah dana yang keluar sebesar Rp.13.083.858.000 dan sisa dana menurut bank sebesar Rp. 5.199.779.000, saving AMAN sejumlah Rp. 287.569.000 (rincian posisi keuangan terlampir). Laporan keuangan telah dimuat di media gaung AMAN dimana publikasinya mengikuti durasi cetak atau terbitnya gaung AMAN. Adapun yang menjadi kendala di bagian keuangan adalah pengiriman alat bukti terhadap pengajuan uang muka atau penggunaan dana terutama yang terkait dengan kegiatan organisasi untuk mendukung Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Konsolidasi di Komunitas.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Terlaksananya 2 training keuangan untuk 18 Pengurus Wilayah dan Organisasi Sayap (BPAN dan PA).



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

2. Bersama Kedeputusan II membuat budget KEMITRAAN dan perencanaan proyek Kemitraan.
3. Pendampingan anak magang dan Keuangan BPAN dalam transaksi harian dan dasar-dasar Accurate.
4. Komunikasi dengan PW-PW dalam penagihan laporan yang dilaksanakan di PW
5. Membuat laporan keuangan di Gaung AMAN
6. Membuat SOP Sekretariat PB AMAN
7. Pendistribusian seluruh Gaung AMAN dan dokumen kepada Pengurus
8. Perbaiki sistem administrasi PB AMAN yang lebih terkoordinasi
9. Melayani proses transaksi keuangan dan proses audit laporan keuangan
10. Merancang konsep penggalangan sumber dana publik

3.4. Dukungan terhadap PEREMPUAN AMAN dan BPAN

Dukungan PB AMAN sebagai organisasi induk terhadap PEREMPUAN AMAN sebagai organisasi sayap dilakukan dengan memberikan program-program pelatihan yang dikelola oleh Perempuan AMAN untuk memastikan agenda organisasi berjalan dengan baik. Contoh yang dilakukan adalah dukungan kegiatan pelatihan untuk perempuan AMAN kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan Rakernas PEREMPUAN AMAN 2013 yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 6-7 September 2013. Pasca Rakernas III pelatihan yang dikelola oleh Perempuan AMAN sebanyak 7 pelatihan di tingkat Nasional dan Region.

Dukungan PB AMAN dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sayap BPAN juga dilakukan dengan memberikan program untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh BPAN. Lewat program ini BPAN diharapkan bisa membangun struktur organisasi di tingkat wilayah. Adapun BPAN wilayah yang terbentuk ada di 5 wilayah yang meliputi BPA Sumatera Utara, BPA Kalteng, BPA Sulteng, BPA Sulsel, BPA Kaltim.

3.5. Terbentuknya Organisasi Sayap AMAN Yang Baru

Pertemuan para pengacara yang dilakukan di Wilayah Tanah Luwu telah menghasilkan satu organisasi sayap yaitu Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat (PPMA) telah merumuskan statuta dan program kerja yang akan didetailkan dan didiskusikan kembali dengan organisasi induk untuk dilaksanakan dengan maksimal di masa depan.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Bagian IV

Organisasi Sayap dan Badan-badan Otonom

4.1. Barisan Pemuda Adat Nusantara/BPAN

Tahun pertama sampai tahun ke-dua penyelenggaraan organisasi BPAN diprioritaskan pada **propaganda media dan mobilisasi** sebagai “corong” organisasi keluar dan **Penataan organisasi** sebagai fondasi gerakan baik di tingkat nasional, wilayah, daerah maupun di kampung-kampung, yang dalam jangka waktu panjang diharapkan dapat memberikan pembelaan dan pelayanan yang cepat dan efektif kepada masyarakat adat dan oleh seluruh anggota BPAN, dan memiliki perangkat untuk merespon tantangan dan peluang serta kebutuhan gerakan pemuda adat, baik secara nasional maupun internasional.

4.1.1. Penataan Organisasi

Penguatan Organisasi dan Keanggotaan

Sampai saat ini telah terbentuk 10 Pengurus Wilayah, 15 Pengurus Daerah dan 49 Komisariat Kampung (Korkam). Jumlah anggota yang telah dikukuhkan sebanyak 767 orang.

Pengadaan Atribut Organisasi

Bendera BPAN yang telah dicetak sebanyak 800 helai dan yang sudah didistribusikan sampai saat ini sebanyak 340 helai. Buku saku Organisasi saat ini sedang dalam tahap *layout* dan akan dicetak perdana sebanyak 1000 exemplar.

4.1.2. Propaganda Media

Untuk saat ini, sistem komunikasi dan penyebaran informasi dilakukan melalui Email, Mailing List, HP dan Jejaring Sosial seperti Facebook dan Twitter.

- Jumlah alamat email yang dikelola dalam mailing list sebanyak: 124 alamat email.
- Jumlah akun Facebook yang masuk dalam group FACEBOOK BPAN sebanyak: 531 orang.
- Jumlah akun Facebook yang me-LIKE Fanpage BPAN sebanyak: 379 orang
- Jumlah akun Facebook yang me-LIKE Fanpage Hutan Adat Kita - HAK sebanyak: 215 orang.
- Jumlah followers di Twitter @PemudaAdat sebanyak: 116 orang.
- Ada 8 tema foto story siap dipublikasi ke website dan jejaring sosial.

4.1.3. Mobilisasi

- Aksi menolak PT. Kodeco Timber di 2 Kabupaten di Kalimantan Selatan.
- Aksi solidaritas Hari Tani Nasional 2013 bersama Sekber PHRI di Jakarta.
- Aksi menolak Pembangunan Kereta Api untuk Batubara di Kalimantan Tengah.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

- Sosialisasi Putusan MK 35 yang dilakukan oleh 6 Pengurus Wilayah BPAN (Sumut, Malut, Sulteng, Kalteng, Kalsel, Kalbar)
- Bersama pengurus AMAN, memobilisasi gerakan Plangisasi Hutan Adat. Sebanyak 36 foto-foto plangisasi sudah diupload pada FanPage Hutan Adat Kita - HAK. Dan banyak lagi yang tidak terdokumentasikan karena berbagai kendala.
- Kampanye pada kegiatan expo Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Unit Konservasi Fauna Institut Pertanian Bogor dengan tema "Masyarakat adat dan Konservasi" di kampus IPB Bogor. Tanggal 7 - 10 Oktober 2013.
- Penggalangan relawan kampus pada Expo Unit Konservasi Fauna dengan tema "Masyarakat adat dan Konservasi" di kampus IPB, Bogor. Sudah terkumpul relawan sebanyak 2 Orang.
- Penggalangan 35 juta tanda tangan selama Oktober 2013 - Maret 2014 untuk Petisi Nasional terkait pelaksanaan Putusan MK 35 dan Pengesahan RUU PPHMA. Dari tanggal 7 oktober sampai tanggal 14 Oktober baru terkumpul sebanyak 500 tanda tangan dan akan bertambah terus sampai batas waktu yang ditentukan.
- Berbagi isu dengan jaringan mahasiswa/i STIMA KOSGORO, Universitas Negeri Jakarta untuk penggalangan serta dukungan petisi nasional terkait Putusan MK 35.

4.1.4. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas (training) yang dilakukan dan diikuti pasca Rakernas AMAN, antara lain:

- Training investigasi di tiga region (Timur, Tengah, Barat), yang diikuti sebanyak 45 orang
- Training public speaking di Jakarta, yang diikuti sebanyak 10 orang
- Training Citizen Journalism di Kalimantan Timur, yang diikuti sebanyak 20 orang.
- Training Emergency Response yang diselenggarakan oleh AMAN dan CRS (*catholic relief services*) di Ternate dan Medan, peserta dari BPAN sebanyak 8 orang.
- Training Lanjutan *Emergency Response Capacity Building (ECRB) - Field Assesment Training*, 23 - 26 September 2013, 1 orang.

4.1.5. Status Keuangan

Saldo terakhir per September 2013 = **Rp. 7.453.531**. Ada 2 (dua) pendanaan yang masih dalam proses, yakni dari *Trust Fund \$10.000* sudah ada *agreement*, tinggal proses transfer; dari WWF sebesar **\$10.000** sudah ada komitmen bersama, tinggal menindak lanjuti *agreement*.

4.2. PEREMPUAN AMAN

PEREMPUAN AMAN merupakan salah satu organisasi sayap AMAN yang dideklarasikan pada tanggal 16 April 2012 di Tobelo Halmahera Utara. Pasca Rakernas III AMAN di Tumbang Malahoi bahwa organisasi Induk akan memperkuat



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

organisasi sayap sebagai basis penggerak utama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat komunitas, khususnya terhadap hak-hak perempuan adat. Beberapa yang telah dilakukan antara lain:

4.2.1. Pelaksanaan Mandat Organisasi

Pelaksanaan mandat organisasi pasca temu nasional dan Rakernas III AMAN, telah terbentuk 14 Koordinator Wilayah perempuan AMAN (Korwil Kalimantan Selatan, Korwil Kalimantan Tengah, Korwil Kalimantan Timur, Korwil Kalimantan Barat, Korwil Sulawesi Tengah, Korwil Sulawesi Selatan, Korwil Sulawesi Utara, Korwil Tana Luwu, Korwil Jambi, Korwil Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Korwil Bengkulu, Korwil Tano Batak, Korwil Jawa bagian timur). Kemudian terbentuk 7 Koordinator Daerah (Korda) Perempuan AMAN (Korda Paser, Korda Sekatak, Korda Hulu Sungai Tengah, Korda Kotabaru, Korda Balangan, Korda Barito Timur, Korda Sampit) dan juga telah terbentuk 4 Koordinator kampung (Korkam) Perempuan AMAN (Halmahera Utara: Korkam Popilo, Korkam Gorua Utara, Korkam Gorua, Korkam Gorua Selatan). Jumlah calon anggota Perempuan AMAN yang rencananya akan disahkan dengan melengkapi pengisian form anggota sebanyak 197 orang.

Kemudian Perempuan AMAN juga telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional yang dilakukan pada tanggal 6 - 7 September 2013 di Bogor. Perempuan AMAN juga telah melaksanakan 3 kali Rapat Pengurus Nasional dan Rapat Dewan Nasional.

Rapat Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN dilaksanakan pada tanggal 7 September dan salah satu keputusan yang keluar adalah Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Perempuan AMAN yaitu saudara Surti Handayani, dan membentuk tim adhoc yang kemudian menunjuk saudara Arifin Saleh sebagai Ketua Tim Pelaksana Perempuan AMAN dan saudara Silvy Motoh sebagai Anggota.

Tim Pelaksana Perempuan AMAN diberi waktu selama tidak lebih dari 3 bulan dengan tugas utama adalah:

1. Menjalankan fungsi operasional sekretariat nasional.
2. Memberikan bantuan teknis kepada saudara surti untuk menyelesaikan laporan yang tertunda.
3. Mengamankan Asset Perempuan AMAN. Hasil yang telah dilakukan oleh tim adalah sudah menyelesaikan dan mengarsipkan seluruh dokumen organisasi, kontrak kerjasama program dan hasil pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk laporan keuangan masih baru terselesaikan 70% yang disebabkan oleh bukti-bukti pengeluaran kegiatan yang belum terlengkapi. Untuk Asset yang dimiliki oleh Perempuan AMAN telah diidentifikasi dan diberi kode terhadap aset yang dimiliki antara (2 buah Laptop, 1 buah Printer, 2 buah HP Blackberry, 1 buah modem, 1 buah container, 1 buah kamera digital, 1 buah lemari penyimpanan file, 1 paket ATK).

Dalam hal pelayanan terhadap pengurus perempuan AMAN, telah dilakukan peningkatan kapasitas antara lain: Pelatihan *Public Speaking* kerjasama dengan Intermatrix untuk meningkatkan kapasitas juru bicara kunci terhadap para



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Pengurus Perempuan AMAN, diikuti oleh 3 orang Dewan Nasional, Sekpel dan staf Seknas PEREMPUAN AMAN, Pelatihan Jurnalisme warga dan radio komunitas, Pelatihan Keuangan System Accurate yang diikuti oleh Staf Keuangan Seknas PEREMPUAN AMAN. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas untuk anggota, pengurus wilayah dan daerah dengan jumlah orang yang telah dilatih sebanyak 148 orang, pelatihan yang dilakukan antara lain ;

- 1) TOT tingkat Nasional pertama “Perempuan Adat dan Proses Pengambilan Keputusan” di Kasepuhan Cipta Mulya, Sukabumi Jawa Barat pada bulan April 2013 diikuti oleh perempuan adat dari Region Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, dan Maluku Utara sebanyak 30 orang peserta
- 2) TOT Nasional ke-dua “Perempuan Adat dan Proses pengambilan keputusan” di Toraja pada bulan Mei 2013 diikuti oleh perempuan adat dari Region Sulawesi, Maluku, NTT dan Papua sebanyak 30 orang peserta
- 3) Training Region Jawa,Bali Nusra “Perempuan adat dan Proses Pengambilan Keputusan” di Banyuwangi pada bulan Juni 2013 diikuti oleh perempuan adat dari NTB, Bali, NTT, Banyuwangi sebanyak 18 Peserta
- 4) Training Region Kalimantan “Perempuan Adat dan Proses Pengambilan Keputusan” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2013, diikuti oleh peserta dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan sebanyak 19 peserta.
- 5) Training Region Sumatera “Perempuan Adat dan Proses Pengambilan Keputusan” di Jambi pada akhir bulan Juli 2013, diikuti oleh perempuan adat dari Tano batak, Sumatera utara, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu dan Jambi sebanyak 30 orang peserta.
- 6) Pelatihan Pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dilaksanakan di CICO Resort Bogor sebanyak 21 orang.
- 7) Kemudian untuk penyebaran informasi dan penekanan isu, Perempuan AMAN juga telah melakukan kegiatan seminar diantaranya Seminar Sehari “Representasi Perempuan Adat di Media Massa Indonesia”, Seminar nasional untuk memberikan masukan terhadap RUPPHMA

4.2.2. Pendanaan PEREMPUAN AMAN

Sumber dana yang dikelola oleh PEREMPUAN AMAN Februari 2013 – 27 September 2013 mencapai Rp. 748.528.229 dengan rincian dana antara lain uang muka yang belum dilaporkan Rp. 435.213.000, Piutang External Rp. 72.283.200, Piutang Program Kepada Sekretariat Rp. 215.448.524. Dana ini bersumber dari dukungan program organisasi induk yang dikelola oleh Perempuan AMAN dan dari proyek kerjasama dengan pihak lain. Perempuan AMAN ke depannya juga akan melaksanakan kegiatan dengan dana yang tersedia dari program Sicolife = 190.997.000, dan dana UN WOMEN = USD 22.112, namun dana ini belum masuk ke dalam rekening Perempuan AMAN.

4.3. Koperasi AMAN MANDIRI

Koperasi AMAN Mandiri dibentuk sebagai wadah untuk mewujudkan salah satu dari 3 pilar yang ada di AMAN yaitu Mandiri Secara Ekonomi. Cita-cita untuk berhimpun mendorong kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat dalam mengelola kekayaannya



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

harus dilakukan secara langsung, menjadi pemain dalam promosi dan penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh Masyarakat Adat, baik secara berkelompok maupun berasal dari wilayah adat komunitas. Sehingga dengan demikian dalam jangka panjang Koperasi ini akan memiliki banyak unit usaha yang mampu menyumbang pendapatan anggota-anggotanya serta meningkatkan pendidikan dan penyadaran dalam upaya menuju kesejahteraan di tingkat komunitas Adat anggota AMAN.

Pada masa yang akan datang diharapkan Koperasi AMAN Mandiri akan memiliki cabang-cabang dan unit usaha yang mampu menampung kebutuhan para anggotanya sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam wilayah adatnya dan telah disepakati untuk dikelola secara bersama. Dalam memenuhi keinginan-keinginan itu memang diperlukan waktu yang cukup lama. Dimulai dari menata organisasi Koperasi, manajemen, pelayanan dan pelaksanaan program-program secara bertahap. Untuk itu dalam perjalanannya sejak Koperasi AMAN dibentuk pada saat rapat kerja nasional AMAN di Palangka Raya, yang dihadiri oleh sekitar 200-an orang peserta. Dalam rapat tersebut hadir juga Direktur Hukum dan Kelembagaan Kementerian Koperasi & UKM RI beserta staff ahli Kelembagaan Menteri Koperasi. Pada rapat tersebut disepakati untuk membentuk dan mendirikan Koperasi, memilih Pengurus dan Pengawas, serta menyusun program kerja.

4.3.1. Kegiatan yang telah dilakukan:

- 1) Rapat pertama pembentukan Koperasi AMAN Mandiri pada 19 Februari 2013 bersamaan dilaksanakannya Rakernas AMAN ke III
- 2) Pengumpulan data calon Anggota dan pencatatan Identitas calon anggota (Saat ini tercatat 116 Calon Anggota, terlihat dari tanda tangan rapat pertama dan FC KTP yang ada)
- 3) Permohonan Nama Koperasi dengan proses 2 bulan sejak diajukan pada pada April 2013, disetujui nama KOPERASI PRODUKSI AMAN MANDIRI.
- 4) Pembuatan Akte Notaris diajukan pada Juni 2013, ternyata ditengah jalan keluar akte baru yang disesuaikan dengan UU. No. 17 tahun 2012 dari Kementerian Koperasi. Kemudian ada proses verifikasi oleh Pihak Kementerian sebelum akte tersebut disahkan oleh Notaris. Akte disahkan pada tanggal 09 September 2013.
- 5) Pembuatan Surat Keterangan Domisili dan NPWP dengan proses 2 Minggu.
- 6) Saat ini Koperasi AMAN Mandiri telah Masuk tahap Verifikasi Badan Hukum, di Kementerian Koperasi, Mengingat bahwa Koperasi AMAN Mandiri adalah Koperasi Nasional maka segala sesuatunya berurusan dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

4.3.2. Pengurus Koperasi Periode 2013-2016

Badan Pengawas:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) Abdon Nababan | (Ketua) |
| 2) Ambu Naptamis SH, MH | (Wakil Ketua) |
| 3) Rainy Berta Natalia Situmorang | (Anggota) |
| 4) Surti Handayani | (Anggota) |
| 5) Simon Pabaras Armansyah | (Anggota) |



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Pengurus

- | | |
|------------------|--------------|
| 6) Taryudi | (Ketua) |
| 7) Linda Wahidah | (Sekretaris) |
| 8) Silvi | (Bendahara) |

Manajemen

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 9) Dalam Proses Perekrutan | (Manager) |
|----------------------------|-----------|

4.3.3. Kelengkapan Administrasi

- 1) Akte Notaris
- 2) Domisili
- 3) NPWP

4.3.4. Program Kerja Kepengurusan Periode 2013-2016

Jangka pendek 1 tahunan

1. Rapat Pengurus dan Pengawas untuk penyempurnaan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, Penyepakatan SOM dan peraturan kerja.
2. Perekrutan Manajer Koperasi.
3. Verifikasi keanggotaan sekaligus pemenuhan Hak dan kewajibannya: Pembuatan Buku dan kartu Anggota, Penagihan Iuran Pokok, iuran wajib dan sukarela, Penerbitan saham anggota sesuai dengan anggaran dasar.
4. Inventaris Harta kekayaan Koperasi secara detail : berupa barang-barang yang telah dibeli dari komunitas, barang-barang yang diproduksi oleh Koperasi seperti tas, baju, pernak-pernik AMAN dll
5. Mengawal Gallery Nusantara bekerjasama dengan Program SICOLIFE AMAN
6. Membuat Usaha Travel Agent untuk ticketing Pesawat

Jangka Menengah 2 Tahun

1. Pendirian cabang-cabang Koperasi
2. Menambah usaha sesuai dengan kebutuhan Anggota dan cabang
3. Mengawal dan mendampingi cabang-cabang Koperasi

Jangka panjang 3 Tahunan

1. Membentuk Asosiasi Koperasi berdasarkan usaha-usaha yang ada di Cabang-Cabang dan Anggota
2. Membentuk Koperasi Sekunder sebagai Koperasi Induk dari kegiatan ekonomi AMAN

4.3.5. Laporan keuangan Koperasi AMAN Mandiri 2012-2013

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Pinjaman Modal usaha dari PB AMAN | Rp. 104.000.000;- |
| 2. Kas | Rp. 28.700.000;- |
| 3. Investasi Usaha | |



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A

Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

a) Piutang Anggota	Rp. 26.000.000;-
b) Penitipan Barang di PW dan PD	Rp. 30.310.000;-
c) Barang Kerajinan dll	Rp. 31.000.000;-
d) <u>Pernak-Pernik AMAN</u>	Rp. 27.000.000;-
Jumlah Investasi	Rp. 114.310.000;-

4. Pengeluaran

a) Pengurusan Akte Notaris	Rp. 12.000.000;-
b) Pengurusan domisili Kantor Koperasi	Rp. 1.200.000;-
c) Pengurusan Badan Hukum	Rp. 3.000.000;-
d) Honor Pengurus Koperasi 2012-2013	Rp. 6.500.000;-
e) <u>Pengeluaran Transportasi & Konsumsi</u>	Rp. 2.500.000;-
Total	Rp. 25.200.000;-

Keuntungan Usaha Periode 2012 - 2013

= (Kas + Investasi) - (Pinjaman Modal + Pengeluaran)

= Rp. 117.810.000;- - Rp. 104.000.000;-

= Rp. 13.500.000;-

4.3.6. Anggota Koperasi

1. Abdon Nababan
2. Rafli M. Zen K.
3. Def Tri
4. Munadi Kilkoda
5. Bata Manurun
6. Agapitus
7. Roganda Simanjuntak
8. Rainny Situmorang
9. Arpandi
10. Sindernal D.
11. Sana'un Angkat
12. Sarwepin S.
13. Pusung Mokoginta
14. Taryudi
15. Johansyah
16. Matulandi Supit
17. Sunardi
18. Ida Ngato
19. Okploremsius Lubis
20. Nuzuluddin
21. Khairul Bukhari
22. Abdul Hamid
23. Maryono Bukhari
24. Rasid Tumonga
25. Gafar M.
26. Daniel M. Sapuky
27. Martha M. Patty
28. Salmon Salenus
29. Johanis Malindir
30. Miso Putra Dayak
31. Paundanan Embong Bulan
32. Junaedi
33. Sangkai
34. Awason
35. Clif Kissya
36. Petra Lawalata
37. Amay Semtudra
38. Robby Frasideo
39. Rudini
40. A. Taupik
41. Agus Irwanto
42. Gabriel Ongirwalu
43. Uberlin
44. Agus Susanto
45. Cuang B. Ringkan
46. Susundoro



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN

Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia

Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954

Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

47. Liberty, S.Pd
48. Batik Kurnia Wati
49. Nesiwati
50. A. Cristiono
51. Dr. Arend L. Mapanawang
52. Sungkei
53. Razali, S.Pd
54. Mumis Paraja
55. Padil
56. Laurentius Seru
57. L. Dikjaya
58. Masri Anwar
59. Ubaidi Abdul Hamid
60. Rawiang S.
61. Yohanis Beban
62. Muslim Andi Yusuf
63. Sirman Sanudi
64. Rizal Mahfud
65. Sardi Razak
66. Elisabeth Nusmartati
67. M. Syapri
68. Yohanes
69. Isaskar Rape
70. Abdul Hamid
71. Yudhi Firmansyah
72. Herman Masallo
73. Abu Sanar
74. Efrianto
75. Mina Susana Setra
76. Jajang Hardiwiyo
77. Surti Handayani
78. Margaretha Seting Beraan
79. Romba Marannu Sombolinggi
80. Sius Nadus
81. Rukka Sombolinggi
82. Nindita Nareswari
83. Eustobio Renggi
84. Mahir Takaka
85. Indra Norman Wahyudi
86. Silvia
87. Annas Radin Syarif
88. Ika Hikmawati
89. Jafri
90. Muhammad Djufrihard
91. Nur Amalia
92. Linda Maryati Wahida
93. Dahlan
94. Erasmus Cahyadi
95. Gatot Sugiharto
96. Arifin Saleh
97. Simon Pabaras Armansyah
98. Indah Puji Lestari
99. Debi Lisa Sitanala
100. Andi Warnoto
101. Yusuf Naza Pratama
102. Jeffar Lumban Gaol
103. Patricia Miranda Watimena
104. Hengky Satrio Wibowo

4.4. Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA

4.4.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Program

Kelembagaan dan Pelaksana

Kelembagaan BRWA sejak diumumkan keberadaannya pada tahun 2010 hingga sekarang masih bersifat *ad hoc*. Pengurus harian BRWA di pusat dan wilayah bersifat voluntary dan memiliki posisi tersendiri di lembaganya masing-masing. Baru pada awal Agustus 2013,

2 posisi struktur Pelaksana Harian BRWA telah terisi yaitu posisi Sekretaris BRWA yang bekerja penuh, dan GIS Staf yang bekerja paruh waktu. Sebelumnya pekerjaan harian BRWA dikelola oleh staf JKPP, untuk beberapa pekerjaan khusus melibatkan pengurus harian BRWA dari FWI dan AMAN.

Kantor Wilayah (Kanwil) BRWA yang beroperasi baru di dua wilayah yaitu Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Kanwil BRWA Kalimantan Barat bekedudukan di kantor PPSDAK-Pancur Kasih-Pontianak dan Kanwil BRWA Sulawesi Tengah berada di kantor Yayasan Tanah Merdeka (YTM)-Palu.

Penyiapan Infrastruktur

Penyiapan operasional dua Kanwil BRWA atas dukungan JKPP, Samdhana dan mitra kerja di masing-masing wilayah. Sejak awal Agustus 2013 Kantor BRWA di Bogor telah memiliki Sekretaris BRWA. JKPP telah memfasilitasi proses penyiapan infrastruktur kantor sekaligus melengkapi fasilitas minimal yang dibutuhkan dalam proses kerja BRWA antara lain: ruang kerja, meja + kursi kerja, sedangkan komputer kerja didukung oleh AMAN. Saat ini kantor BRWA berada di kantor JKPP, Jl. Cimanuk Blok B VII No. 6 Perumahan Bogor Baru 16152.

Program Kerja

Dalam rapat Pengurus BRWA dan Dewan Penyantun BRWA pada 22 Agustus 2013 telah disusun Program Kerja BRWA Periode Oktober 2013 - Agustus 2015. Program tersebut diarahkan untuk Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dengan tujuan sebagai berikut;

1. BRWA pusat dan wilayah memiliki panduan registrasi dan alat kerja standar layanan registrasi, verifikasi dan publikasi peta wilayah adat.
2. Meregistrasi dan verifikasi 500 wilayah adat dan mengintegrasikannya dalam publikasi peta wilayah adat di kantor BRWA pusat.
3. BRWA pusat dan wilayah mengkomunikasikan dan menyampaikan peta wilayah adat kepada pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengakuan hutan adat dan wilayah adat.
4. Bersama JKPP dan AMAN menyiapkan peta indikatif wilayah adat nusantara.

Output

1. Beroperasinya 18 Kantor Wilayah BRWA yang memiliki pengurus, kantor dan alat kerja yang memadai.
2. Pengurus BRWA pusat dan wilayah memahami dan mampu melakukan registrasi, verifikasi dan publikasi wilayah adat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan SOP BRWA.
3. Ada 500 peta wilayah adat yang diregistrasi dan verifikasi dengan informasi lengkap sesuai dengan standar BRWA.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

4. Laporan registrasi dan verifikasi secara reguler (per 2-3 bulan) kepada pemerintah pusat dan daerah.
5. Publikasi peta yang teregistrasi dan verifikasi serta peta indikatif wilayah adat dan perbaruannya setiap 3 bulan di website BRWA.

Pelaksanaan Program

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan periode 2012-2013;

1. Melakukan penerimaan pendaftaran wilayah adat pada Kongres AMAN IV di Tobelo, April 2012 yang menghasilkan 336 komunitas adat yang mendaftar.
2. Bersama JKPP dan Samdhana mengelola sarasehan di kongres AMAN IV.
3. Verifikasi dan pembaruan data pada point 1 dengan hasil sebagai berikut;
 - a. 20 komunitas memiliki alamat email
 - b. 169 nomor HP komunitas masih aktif (dapat dihubungi)
 - c. 76 nomor HP komunitas sudah tidak aktif (tidak dapat dihubungi)
 - d. 54 nomor HP komunitas pending (tidak menjawab)
 - e. 37 komunitas tidak memiliki nomor HP
 - f. 225 di antaranya adalah anggota AMAN
 - g. 19 wilayah telah dipetakan
 - h. 1 wilayah sedang dipetakan
 - i. 316 wilayah belum dipetakan
4. Dalam rangka percepatan pemetaan wilayah adat dan penyiapan peta indikatif wilayah adat, saat ini tengah dilakukan peninjauan kerjasama/ dukungan program dari UKP4 dan BIG melalui penyediaan peta referensi (peta dasar digital/ cetak) dan peta satelit yang tersedia di BIG dan UKP4.
5. Masih dalam rangka percepatan pemetaan wilayah adat dan penyiapan peta indikatif wilayah adat, saat ini telah disusun dan diperbaharui peta SLPP/ anggota JKPP dan penyusunan kriteria syarat minimal BRWA Wilayah. Syarat minimal ini dikembangkan sehubungan akan dibentuknya 20 kantor BRWA wilayah.
6. *Updating* website BRWA dilakukan secara berkala. Website BRWA baru saja diperbaiki setelah mengalami kerusakan sistem.
7. Identifikasi dan kompilasi peta-peta bahasa yang ada.

Panduan Sistem Manajemen

Telah diselesaikan Panduan Sistem Manajemen untuk Dokumen Sistem Registrasi. Panduan dikembangkan dengan tujuan membangun dan mengembangkan alat bantu yang memadai bagi BRWA dalam melakukan pengendalian atas seluruh tahapan siklus pengelolaan program dalam upaya pencapaian tujuan umum organisasi dan tujuan khusus program.

Sistem Manajemen Registrasi telah dituangkan dalam panduan mutu dan prosedur, kerja yang didokumentasikan, dimengerti dan dilaksanakan oleh semua personal secara profesional. Seandainya ke depan dibutuhkan, Sistem Manajemen Registrasi juga akan dituangkan ke dalam instruksi kerja. Namun, sistem ini perlu direvisi sesuai dengan perkembangan proses registrasi dan temuan-temuan dalam uji coba sistem.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Sumber Daya Keuangan

Keuangan dan pendanaan operasional BRWA masih terbatas pada dukungan JKPP, AMAN dan Samdhana melalui program kecil dan jangka pendek. Saat ini masih dalam proses kerjasama dengan PB AMAN dalam kerangka Proyek Sicolife.

4.4.2. Peristiwa - Peristiwa Penting Terkait BRWA

Serah-Terima Peta Wilayah Adat kepada KLH

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada 15 Juli 2013 secara resmi menyerahkan peta wilayah adat yang sudah masuk daftar BRWA kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Peta wilayah adat yang diserahkan berjumlah 324 dengan total luasan 2.643.261,09 hektare.

Ini merupakan penyerahan peta tahap awal AMAN dan BRWA menindaklanjuti kerja sama yang sudah disepakati AMAN-KLH pada 2010 untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya, mendorong pemerintah daerah supaya melakukan inventarisasi dan regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat secara turun-temurun sesuai amanat UU PPLH No. 32/ 2009 Pasal 63 serta mendukung **Indonesia One Map Policy** yang sedang dijalankan pemerintah melalui UKP4 dan BIG.

National Workshop on the Forestry Law Constitutional Court Ruling No. 35/PUU/X/2012

Lokakarya tanggal 29-30 Agustus 2013 yang berlangsung di Jakarta, bertujuan untuk melihat implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/ 2012 dan memperoleh masukan mengenai pengelolaan hutan adat di Indonesia.

Penyelenggara lokakarya adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bermitra dengan United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID). Kepala BRWA (Kasmita Widodo) dan Dewan Penyantun BRWA (Abdon Nababan) menjadi salah satu narasumber lokakarya ini.

Workshop Sunda Kecil Maluku/SuKMA

Workshop tanggal 22-23 September 2013 yang dilaksanakan di Lombok, NTB bertujuan untuk integrasi program 2014-2015 Samdhana, JKPP, AMAN, BRWA untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tergabung dalam Sunda Kecil Maluku.

Workshop Dokumentasi Kawasan Konservasi oleh Masyarakat Adat/lokal

Workshop tanggal 24-26 September 2013 yang bertempat di Malinau, Kalimantan Utara ini bertujuan antara lain untuk berbagi pengalaman proses dokumentasi dan pemetaan wilayah adat serta upaya-upaya konservasi oleh masyarakat adat/ lokal. Kepala BRWA menyampaikan penting registrasi wilayah adat kaitannya dengan



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

implementasi Keputusan MK No.35/2012 tentang Hutan Adat dan Perda Malinau No.10/2012 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Malinau.

BRWA dalam Berita (periode Januari 2010 - September 2013)

Pada periode Januari 2010 - 2013, terdapat 36 artikel yang menurunkan berita/mencantumkan nama Badan Registrasi Wilayah Adat.

4.5. Community Green Gold Mining/CGGM

4.5. 1. Kegiatan Pengorganisasian dan praktek Konsep CGGM di Kasepuhan Cisitu

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Kasepuhan Cisitu berkaitan dengan program CGGM antara lain:

Sosialisasi Konsep CGGM

Sosialisasi ini telah dilakukan mulai dari pengurus adat dan juga masyarakat penambang dan keluarganya di wilayah Kasepuhan Cisitu. Sosialisasi ini dilakukan mengawali program CGGM di Kasepuhan Cisitu. Materi sosialisasi antara lain adalah pentingnya penguasaan SDA oleh masyarakat adat, pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan, bahaya-bahaya bahan kimia dalam pengolahan emas, aspek legalitas pertambangan rakyat dan pentingnya pemahaman kebersamaan (*community base*) dalam pengelolaan.

Setelah sosialisasi ini sempat dilakukan pendataan penambang rakyat baik di masyarakat kasepuhan Cisitu maupun pengumpulan data lubang tambang di lokasi Cikidang.

Pembentukan Koperasi Cisitu Mulya Jaya

Koperasi CMJ telah terbentuk dengan segala perlengkapan perizinannya seperti akte notaris, NPWP, TDP, HO, Surat ijin B3, dan juga RAT yang pertama tahun 2012. Saat ini anggota koperasi baru sekitar 85 orang. Pertambahan anggota tidak terjadi karena memang belum dikehendaki oleh Ketua Koperasi. Sementara pengurus lain dan para anggota sudah antipati pada keberadaan koperasi yang tidak aspiratif.

Pengambil alihan lokasi tambang Cikidang dari kelompok illegal.

Proses pengambil alihan lokasi tambang ini sangat menyita energi, dana dan waktu. Tahap awal dengan pendekatan musyawarah, gagal. Penggunaan tokoh masyarakat/jawara hasilnya gagal. Penggunaan aparat kepolisian setempat hasilnya gagal. Melibatkan Kopasus hasilnya gagal. Dan terakhir melibatkan Brimob Mako Kelapa II juga tetap gagal. Untuk proses ini setidaknya menghabiskan dana tidak kurang dari 300 juta.

Pengambil alihan sementara lokasi Cikidang oleh koperasi Kira-kira selama 2 bulan, lokasi Cikidang sempat dikuasai oleh koperasi, yaitu pada saat melibatkan Brimob. Selama 2 bulan tersebut pemasukan untuk koperasi kira-kira 200 jt. Tetapi biaya untuk pelibatan Brimob lebih dari 200 jt.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

RAT Koperasi Cisitu Mulya Jaya

Rapat Anggota Koperasi dilakukan setelah Koperasi terbentuk selama satu tahun, dan menghasilkan rencana kerja termasuk kesepakatan pergantian pengurus Koperasi Cisitu Mulya Jaya

Pembentukan Team CGGM Cisitu

Pembentukan Tim CGGM Cisitu dilaksanakan untuk melaksanakan kerja-kerja CGGM di wilayah adat Kasepuhan Cisitu, tetapi karena Konflik antar pengurus CGGM dan Ketua Koperasi akhirnya Tim dengan sendirinya menjadi stagnan

Pengukuran Konsentrasi Racun di tanah dan tubuh warga Cisitu kerjasama CGGM-Balifokus

Pekerjaan dilakukan bersama dengan Bali Focus, sebuah LSM yang berkonsentrasi pada kebersihan Lingkungan dimana salah satu divisinya adalah mendorong pertambangan dan industry untuk menuju “zero Mercury”

Evaluasi dan Monitoring

Dilaksanakan pada November 2013 bersamaan dengan pemaparan hasil dari pengukuran racun yang ada di tanah dan dalam tubuh masyarakat yang berada di Kasepuhan Cisitu. Rencananya akan dilakukan pada awal November 2013

4.5. 2. Kegiatan Pengolahan di luar kasepuhan Cisitu

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di luar Kasepuhan Cisitu berkaitan dengan program CGGM antara lain:

Base Camp Cicarucup

Melakukan pengambilan contoh jenis-jenis batuan di seputaran Cikotok. Setidaknya terdapat 12 lokasi tambang dengan sample lebih dari 30. Di base camp ini batuan sample yang terkumpul diperiksa karakteristik untuk mengetahui jenis batumannya. Kemudian dilakukan penghancuran dengan cara ditumbuk sampai hancur seperti pasir. Setelah itu akan dilakukan beberapa pengolahan dengan berbagai macam sytem sesuai dengan karakteristik batumannya. Ada yang langsung diolah dengan system perendaman, ada yang harus dihaluskan sampai sekitar 200 mesh untuk selanjutnya diolah dengan system tong dan juga perendaman.

Di base camp Cicarucup ini juga dilakukan pengenalan system pengolahan yang lebih spesifik sesuai karakteristik batuan kepada kelompok dan masyarakat yang datangnya sewaktu-waktu. Beberapa masyarakat langsung mempraktekkannya ditempat masing-masing dengan dampingan tim CGGM.

Percobaan atau pengujian dengan metode yang dikembangkan oleh tim CGGM sebagian besar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Batu urat/ ORE yang biasanya kurang menguntungkan diolah dengan system amalgamasi atau menggunakan Mercury, bila diolah dengan metode yang diperkenalkan oleh tim CGGM mendapatkan hasil yang lebih baik.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Namun ketika masyarakat mencoba dengan jumlah yang sangat besar, sejauh ini masih seringkali gagal. Masalah utamanya adalah rendahnya Quality control pada bahan baku. Selalu saja dengan sengaja mereka memasukkan bahan baku yang tidak jelas, dengan harapan mendapat hasil yang mengejutkan.

Proses pengenalan batuan di seputaran Cicarucup ini menghabiskan waktu sekitar 6 bulan. Biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan sample sampai dengan mengetahui hasil kandungan emasnya berkisar 1 s/d 3 juta rupiah. Biaya tersebut adalah untuk perjalanan ke lokasi, pengambilan sample ke dalam lubang, proses pengolahan, obat-obatan, dan proses pemurnian. Sample-sample terkadang diantar oleh penambang, namun sangat penting untuk ditelusuri sampai ke lokasi tambangnya.

Proyek Percontohan

Sebenarnya lebih cocok disebut dengan proyek penerapan terhadap beberapa kelompok. Kurang cocok disebut sebagai percontohan, karena ternyata hasil dari kegiatan ini justru tidak bisa dicontoh. Praktek pengolahan dalam kuantitas besar yang dilakukan di beberapa lokasi kelompok masyarakat, selalu saja berhasil dalam skala kecil, tetapi gagal dalam kuantitas bahan baku yang besar.

Biasanya sebelum mengolah dalam jumlah besar di atas 10 ton, akan dilakukan pengujian pengolahan antara 40 kg s/d 80 Kg (1-2 karung). Contoh yang digunakan untuk pengujian secara sadar pasti diambil adalah kualitas terbaik sehingga hasil olahan seperti yang diharapkan. Tetapi begitu praktek pengolahan 4 ton s/d 10 ton, kualitas bahan baku sudah tidak terkontrol lagi.

Praktek pengolahan skala besar yang dilakukan adalah mengolah lumpur sisa gelundung (sisa dari proses amalgamasi) dengan kuantitas minimal 6 ton sekali olah. Sedangkan praktek pengolahan system rendaman batuan yang dicrusher saja berkisar antara 8 - 10 ton sekali olah.

Sampai pad bulan September 2013 telah dilakukan praktek pengolahan skala besar di 5 lokasi, yaitu di Pasir Nangka, di Cibadak, di Cihanet, di Ciparay, dan di Cibareno. Total pengolahan lumpur kurang lebih 36 ton dan batu urat 60 ton. Target bahan baku yang disepakati untuk diolah bersama kelompok masyarakat adalah antara 5 ppm s/d 12,5 ppm. Namun selalu saja komitmen kualitas batu atau lumpur yang diolah tidak bisa dilaksanakan.

Biasanya bila ada batuan dengan kandungannya masih di atas 12,5 ppm, masyarakat masih tetap mengolahnya dengan mercury dan mereka tidak mau mencoba dengan metode yang diperkenalkan oleh CGGM. Jadi istilah kasarnya, cuma batuan-batuan yang jelek saja yang mau dikerjasamakan dengan tim CGGM. Untuk itu seyogyanya CGGM mesti punya lubang tambang sendiri.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/ AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Sistem Pengolahan

Sistem Rendaman Batuan.

Batuan yang diolah dihancurkan/ *dicrushers* s/d mess 50. Apabila batuan mengandung pirit (Fe) atau Pb, harus dicampur dengan HCl atau H₂SO₄. Bahan baku kemudian dinaikkan PH-nya sampai 11 dengan NaOH (costik) dicampur dengan EpoxCl, Pb Nitrat, Ag Nitrat, dan HCN. Untuk mempercepat proses di aerasi dengan udara atau campuran H₂O₂. Setelah proses 48-72 jam, emas yang terlarut ditangkap dengan *Zink foil* atau karbon.

Hasil penangkapannya kemudian dibakar untuk mendapatkan bullion, yaitu campuran emas dan perak. Terakhir dilakukan pemurnian dengan proses Cukim untuk mendapatkan emas murni atau Logam Mulia (LM) Biaya untuk pengolahan System Rendaman ini berkisar antara Rp. 1juta s/d Rp. 1,5 juta per ton, tergantung jenis batumannya.

Sistem Pengolahan Lumpur dengan Tong

Yang membedakan dengan system no.1 adalah kehalusan bahan bakunya, yaitu sekitar 200 mess atau lebih. Prosedurnya sama, walaupun konsentrasi/dosis penggunaan bahan kimia campurannya berbeda. Kemudian system penangkapan emasnya hanya menggunakan karbon. Biaya pengolahan system ini berkisar antara 1,5jt-2jt per ton.

Sistem Pengolahan Lumpur dengan Perendaman.

Pengolahan lumpur dengan perendaman sangat mengurangi biaya, karena dapat dilakukan di bak-bak sementara maupun permanen dengan kapasitas lebih besar. Prosedurnya hampir sama juga dengan system no.1 dan no.2, tapi penangkapannya hanya dengan menggunakan *zink foil*. Biaya pengolahan system ini berkisar antara 500 ribu rupiah s/d 800 ribu rupiah per ton.

4.5.3. Mini Laboratorium

Mini Laboratorium yang diperlukan dan dipersiapkan oleh tim CGGM adalah untuk pengujian:

- Ada tidaknya kandungan emas pada campuran/ larutan yang sedang dalam proses pengolahan.
- Pengontrolan PH
- Pengontrolan kandungan sianida bebas pada campuran/ larutan yang sedang dalam proses pengolahan.
- Membedakan antara kandungan emas dan perak dengan logam lainnya.
- Selain itu juga terdapat berbagai macam alat pembesar untuk membantu menganalisa jenis dan kandungan batuan dari penampakkannya.

4.5.4. Lobang Tambang

Sampai saat ini, tim teknis CGGM belum berhasil memiliki satu lubang tambang sendiri, yang dapat digunakan sebagai sumber bahan baku yang akan diolah sendiri oleh tim.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago
Rumah AMAN. Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, 12520. Indonesia
Telepon : +622183706282 Fax : +62218297954
Website: www.aman.or.id Twitter: rumahaman

Beberapa usaha yang dilakukan tetapi belum berhasil antara lain:

- Bekerjasama dengan sdr. Agus dari Cibadak, tetapi tidak berhasil. Produksi awal batuan urat yang dihasilkan kandungan emasnya sangat rendah. Saat ini karena sdr. Agus juga kehabisan modal, pekerjaan di lubang Cirotan masih terhenti. Modal yang sudah disetor 30 jt.
- Bekerjasama dengan sdr. H. Yayat di Pasir Gombang. Produksi urat sangat minim dan jenis uratnya sangat tinggi mengandung Fe (pirit); Biaya pengolahan tinggi, tetapi kandungan emasnya rendah. Modal yang sudah disetor 23 jt.
- Saat ini sedang menganalisa beberapa lubang potensial yang rencananya akan diambil alih secara penuh oleh tim CGGM supaya pengelolaan lubang bisa sepenuhnya dioperasikan oleh tim. Nantinya disamping menjadi sumber bahan baku untuk tim CGGM, lubang tersebut akan dijadikan lubang percontohan, baik dalam hal teknis penambangan, keselamatan dan penggunaan teknologi tepat gunanya.

4.5.5. Rekomendasi

- 1) Sebaiknya ada kesepakatan akan seperti apa dan sebisa mungkin hal yang sudah disepakati itu dapat direalisasikan sebaik-baiknya. Tanpa itu, kita semua akan sama-sama terjebak dalam masalah yang sudah kita ketahui. Akhirnya, cita-cita CGGM nggak kunjung tercapai, namun wilayah-wilayah adat yang potensial makin habis dikuasai oleh para investor asing.
- 2) Keterlibatan Pengurus AMAN ditingkat PW dan PD menjadi sangat perlu dan merupakan tolak ukur keberadaan AMAN di Wilayah Kasepuhan Cisu
- 3) Pemilihan Lokasi yang sudah siap dan sudah memiliki kelembagaan Usaha dan kelembagaan Adat yang kuat dapat diukur dengan keputusan-keputusan Adat yang dilaksanakan dan dijalankan oleh warganya.
- 4) Keterlibatan Tim CGGM secara penuh yang memiliki unsur-unsur keahlian yang dibutuhkan, seperti community organiser, teknis, hukum dan Kelembagaan Usaha.
- 5) Permodalan usaha yang cukup untuk jangka panjang minimal 2 tahun sejak usaha dimulai, setelah proses persiapan dan sosialisasi dilakukan.

4.5.6. Aset dan Sumberdaya Manusia

1. Tempat pengolahan Emas dengan kapasitas 20 ton sekali pengolahan dengan tanah sewa bagi hasil.
2. Seperangkat Peralatan pengolahan
3. Sepeda motor AMAN ada 2 buah
4. Laboratorium Mini lapangan
5. Aktivistis CGGM 4 Orang